

**PENGARUH KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH, UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA, BELANJA MODAL, DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
15 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2022**

(Skripsi)

Oleh

**DWI AHMADI
2051021021**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PENGARUH KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA, BELANJA MODAL, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI 15 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2022

Oleh

DWI AHMADI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Belanja Modal (BM), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel independen/bebas terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebagai variabel dependen/terikat 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung selama 2018-2022 menggunakan aplikasi E-Views 10 data panel. Uji terbaik dalam model regresi ini menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan melalui Uji Chow. Secara parsial kemandirian fiskal daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Upah minimum kabupaten/kota berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara simultan variabel kemandirian fiskal daerah, upah minimum kabupaten/kota, belanja modal, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia, Kemandirian Fiskal Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Upah Minimum Kabupaten/Kota

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF REGIONAL FISCAL INDEPENDENCE, REGENCY/CITY MINIMUM WAGE, CAPITAL EXPENDITURE, AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX ON ECONOMIC GROWTH OF 15 DISTRICTS/CITIES IN LAMPUNG PROVINCE IN 2018-2022

By

DWI AHMADI

The aim of this research is to examine how regional fiscal independence, the regency/city minimum wage, capital expenditure, and the human development index—treated as independent variables—impact economic growth, which is the dependent variable, in 15 regencies/cities in Lampung Province during the period from 2018 to 2022, using the E-Views 10 panel data application. The best test for this regression model employs the Fixed Effect Model (FEM) through the Chow Test. The results indicate that regional fiscal independence positively and significantly affects economic growth. Conversely, the regency/city minimum wage has a significant negative impact on economic growth. Additionally, capital expenditure and the human development index exhibit a significant positive effect on economic growth. Overall, the simultaneous effects of regional fiscal independence, the regency/city minimum wage, capital expenditure, and the human development index significantly impact economic growth in the 15 districts/cities in Lampung Province.

Keywords: *Capital Expenditure, Human Development Index, Regional Fiscal Independence, Economic Growth, and Regency/City Minimum Wage*

**PENGARUH KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH, UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA, BELANJA MODAL, DAN INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
15 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018-2022**

Oleh

DWI AHMADI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

Pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022

Nama Mahasiswa

Dwi Ahmadi

Nomor Pokok Mahasiswa

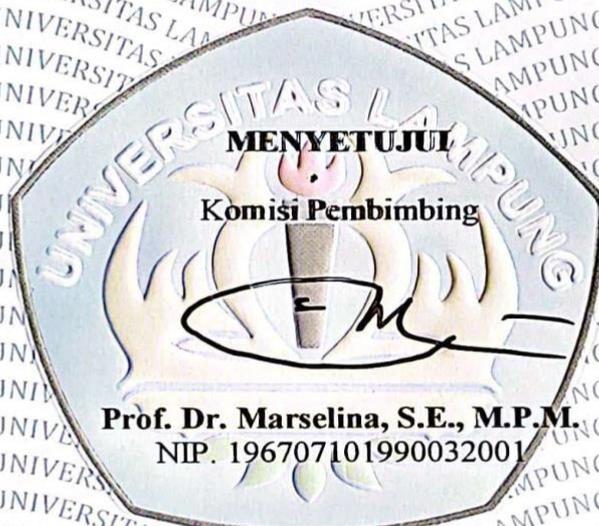
2051021021

Program Studi

Ekonomi Pembangunan

Fakultas

Ekonomi dan Bisnis



MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Arivina Ratih YT, S.E., M.M.

NIP. 19807052006042002

MENGESAHKAN

I Tim Penguji

Ketua Penguji

Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M.

Penguji Utama

: Dr. Ida Budiarty, S.E., M.Si

Sekretaris Penguji

: Emi Maimunah, S.E., M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si

NIP. 19660621 199003 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 18 Oktober 2024

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Ahmadi

NPM : 2051021021

Program Studi : S1 Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul “Pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022” adalah benar-benar hasil penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan-penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, 10 September 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Dwi Ahmadi
NPM. 2051021021

RIWAYAT HIDUP



Dwi Ahmadi lahir di Kota Bandar Lampung pada 19 Desember 2002, anak kedua dari tiga bersaudara, memiliki seorang Bapak bernama Heri Peni Asmara dan Ibu bernama Ina Syahdiana Riz. Pendidikan yang ditempuh peneliti yaitu Pendidikan Taman Kanak-kanak Tut Wuri Handayani, Bandar Lampung (2008), Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Gunung Terang, Bandar Lampung (2014), Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Bandar Lampung (2017), dan Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Bandar Lampung (2020). Peneliti berhasil masuk menjadi mahasiswa di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung (2024).

Selama menjalani perkuliahan, peneliti aktif mengikuti berbagai organisasi internal seperti *Economics' English Club* sebagai ketua umum masa jabatan tahun 2023, Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan sebagai sekretaris bidang 1 (keilmuan dan penalaran) masa jabatan tahun 2022, *Economics and Business Entrepreneur Club* sebagai anggota bidang 1 (pembinaan dan pengembangan profesi kewirausahaan) tahun 2022, Rohani Islam sebagai kepala departemen Hubungan Masyarakat masa jabatan 2021, serta mengikuti LDK Birohmah Unila sebagai anggota divisi kaderisasi tahun 2021. Peneliti telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Way Sindi Hanuan, Pesisir Barat pada tahun 2023.

Prestasi yang diraih peneliti selama kuliah antara lain: *1st winner national essay competition, EFEC EEC Unsoed 2023, Bronze medal, 5th DIIID Johor, Malaysia 2022. 1st winner outstanding student majoring in development economics 2022. 1st winner national essay competition, Pilar Unila 2022. 1st winner national essay competition, HMI wati Bandarlampung 2022. 1st Runner Up national essay*

competition, EFEC EEC Unsoed 2022. Best paper of outstanding students 2022. The most favorite speech competition, the key Depok 2022. Selain itu, peneliti juga aktif membantu menjadi asisten dosen mengajar dari tahun 2021-2024. Menjadi mentor dalam pertukaran mahasiswa merdeka tahun 2022. Aktif mengikuti pengabdian masyarakat (Desa Wonoharjo, Tanggamus). Meneliti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pesawaran serta aktif mengikuti PKM (Program Kreativitas Mahasiswa) dan PMW (Program Mahasiswa Wirausaha) mendapatkan pendanaan/hibah tahun 2021-2023.

Peneliti aktif dalam kepenulisan yang dibuktikan dengan jurnal nasional dan internasional yang sudah terbit dari tahun 2020-2023, menjadi mentor dalam bidang paper presentation (EEC FEB Unila), menjadi pemateri dalam berbagai kegiatan yaitu pelatihan organisasi dan kepemimpinan pada UKM-F MUN Hukum 2023 dan Pelatihan Karya Tulis Ilmiah Himepa FEB Unila 2024. Selain itu menjadi juri pada EEC's Internal Competition 2024 dan juri Lomba Essay Nasional GenBi Bank Indonesia 2024.

MOTTO

“Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, celakalah bagi mereka yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.”

-Q.S Ibrahim:2-

“One day you’ll wake up and there won’t be any more time to do the things you’ve always wanted to do. Do it now!”

-Paulo Coelho-

“Sepanjang kita mau melihatnya, maka kita selalu bisa menyaksikan masih ada hal indah di hari paling buruk sekalipun.”

-Tere Liye-

“Meraih masa depan yang cerah tidak akan didapat dengan mudah, kamu harus mau berkorban untuk mendapatkan hal itu.”

-B.J. Habibie-

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

First of all, let me send all my gratitude to Allah SWT, and also our Prophet Muhammad SAW for everything.

Skripsi ini Aku persembahkan khusus untuk:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Bapak Heri Peni Asmara dan Ibu Ina Syahdiana Riz

Orang tua hebat yang selalu membimbing, mendoakan, membesarkan, dan selalu memberikan kasih sayang tiada tara serta memberikan motivasi dalam hidup untuk bisa melangkah lebih maju.

Kakakku Tercinta,

Bagus Pratama

Kakak yang selalu memberi makna kehidupan, mengajari setiap langkah perjuangan, serta membantu dalam menjalani kehidupan.

Adikku Tersayang,

Muhammad Fathur Brilliansyah

Adik tercinta yang selalu menyemangati, mendoakan, dan mambantuku selama berproses di kehidupan ini.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Tahun 2018-2022". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Marselina, S.E., M.P.M., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak motivasi, ilmu, saran, kritik, arahan, semangat, selalu sabar dan ikhlas dalam membimbing serta ketersediaan meluangkan banyak waktu untuk membimbing selama proses pembuatan skripsi, pelaksanaan seminar, hingga penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Ida Budiarty, S.E., M.Si., selaku dosen pembahas 2 pada seminar hasil dan sebagai dosen penguji utama pada ujian *comprehensive* yang telah memberikan banyak saran, masukan, kritik dan ilmu nya demi sempurnanya penulisan skripsi ini.
4. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si., selaku dosen pembahas 2 pada seminar proposal dan sebagai dosen penguji 2 pada ujian *comprehensive* yang telah

memberikan banyak saran, masukan, kritik dan ilmu nya demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Arivina Ratih YT, S.E., M.M., dan Ibu Zulfa Emalia, S.E., M.Sc., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Bapak Arif Darmawan, S.E., M.A., selaku dosen pembimbing akademik serta sebagai Dosen Pembahas 2 dalam Ujian Seminar Hasil yang telah memberikan motivasi, pengetahuan, saran, kritik, dan arahan. Selalu sabar dan ikhlas membimbing selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
7. Bapak Prayudha Ananta, S.E., M.Si., sebagai Dosen Pembahas 1 dalam Ujian Seminar Proposal peneliti yang sudah memberikan saran, kritik, dan masukannya selama proses skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang luar biasa selama masa perkuliahan.
9. Seluruh staff di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah membantu selama masa perkuliahan maupun masa penyelesaian skripsi.
10. Ibuku tercinta, yang tiada hentinya mendoakan, membimbing, membantu dan menemani seluruh proses yang saya lalui.
11. Bapakku tersayang, yang selalu mendoakan, mendukung dan bekerja keras untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya.
12. Kakakku tercinta, yang selalu memberikan dukungan penuh dalam hal apapun, memotivasi dan mendorong untuk terus maju.
13. Adikku tersayang, yang telah menyemangati serta mendukung saya untuk menggapai cita-cita.
14. Keluarga besar kesayanganku, Nini Annie, Aki Max, Mbah Karti, Mbah Salekan, Bibi Anne, Om Yosmin, Bibi Isti, Om Tato, Bibi Mima, Om Upik, Bulek Kanti, Paklek Mahmudi, Bulek Wahyuni, Paklek Santo, Bulek Ani, Bulek Endang, dan Om Aris.

15. Sepupu Tersayangku Ceceu Dinda, Adek Ais, Mas Al, Ammara, Aisyah, Adek Galoeh, Adek Loly, Adek Kareem, Pipi, Naswa, Fara, Fari, Niken, Niko, Naufal, Devi, Dani, Della, Alif, dan Ara.
16. Teman-teman Xabiru 23, Aqifa, Rara, Jihan, Nabila, Pudel, Bisma, Repal, Claw, Jek, Satria, Chyn, Melli, Ansal, Arya, Debby, Anggita, Raihan yang selalu menemani, membantu, mendukung dan menyemangati peneliti selama masa perkuliahan hingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman Presidium Himepa 22, Kak Yazid, Kak Ricky, Kak Salsa, Finny, Kak Arif, Syafa, Salma, Kak Rayhan, Verdi, Kak Tharid, Silva, Kak Aliffia, Fadli, Rara, dan Andini yang selalu menemani, membantu, mendukung dan menyemangati peneliti selama masa perkuliahan hingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-teman Rois FEB Unila 21 serta keluarga besar Birohmah Unila yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih atas bimbingan ilmu serta perjuangan dalam Fi Sabilillah.
19. Teman-teman KKN Way Sindi Hanuan, Bilqis, Rahma, Ranti, Novia, Leman dan Airlangga, terima kasih atas dukungan dan pengalaman baru yang diberikan.
20. Murid-murid TPA KBM yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih sudah selalu memberikan semangat dan memberikan warna dalam kehidupan ini.
21. Teman-teman seperjuangan EP 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, terima kasih sudah mendukung, membantu, serta memberikan pengalaman berharga dalam kehidupan kampus ini.
22. Almamater yang ku banggakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
23. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all time.*

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan kita serta memberikan kasih sayang dan perlindungan tiada hentinya. Akhir kata, peneliti memahami bahwa skripsi ini berada pada kondisi yang tidak sempurna, akan tetapi besar harapan skripsi ini membawa kebermanfaatan dan dapat berguna bagi kita semua.

Bandar Lampung, 10 September 2024

Peneliti

Dwi Ahmadi

2051021021

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Manfaat Penelitian	17
II. LANDASAN TEORI	19
2.1 Kajian Pustaka	19
2.1.1 Peran Pemerintah	19
2.1.2 Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah	23
2.1.3 Teori Pertumbuhan Solow-Swan (Neoklasik)	27
2.1.4 Kemandirian Fiskal Daerah	30
2.1.5 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).....	31
2.1.6 Belanja Modal	33
2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia	33
2.1.8 Teori Pertumbuhan Ekonomi	36
2.2 Tinjauan Empiris.....	38
2.3 Kerangka Pemikiran.....	41
2.4 Hipotesis Penelitian	42
III. METODE PENELITIAN	43
3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data	43
3.2 Definisi Operasional Variabel.....	44
3.3 Metode Analisis dan Model Regresi	46

3.3.1	Estimasi Regresi Data Panel	46
3.3.2	Uji Kesesuaian Model	50
3.4	Teknik Analisis Data.....	52
3.4.1	Uji Asumsi Klasik.....	52
3.5	Pengujian Hipotesis	54
3.5.1	Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)	54
3.5.2	Uji Pengaruh Serempak (Uji-F)	55
3.5.3	Koefisien Determinasi (R^2).....	56
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN	57
4.1	Analisis Statistik Deskriptif	57
4.2	Penentuan Penggunaan Model Penelitian	60
4.2.1	Uji Chow	60
4.2.2	Uji Hausman	61
4.2.3	<i>Fixed Effect Model</i>	61
4.2.4	<i>Individual Effect</i>	63
4.3	Perbandingan Model Teretriksi dan Tidak Teretriksi	68
4.4	Perbandingan Model Terbaik Menggunakan F-Test	70
4.5	Perbandingan Model Terbaik Menggunakan AIC, SC, dan HQC.....	71
4.6	Uji Asumsi Klasik.....	72
4.6.1	Uji Normalitas.....	72
4.6.2	Uji Heteroskedastisitas.....	73
4.6.3	Uji Multikolinearitas	73
4.7	Pengujian Hipotesis	74
4.7.1	Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)	74
4.7.2	Uji Pengaruh Simultan (Uji-f)	75
4.7.3	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	76
4.8	Pembahasan.....	77
4.8.1	Pengaruh KEMFD terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	77
4.8.2	Pengaruh UMK terhadap Pertumbuhan Ekonomi	79
4.8.3	Pengaruh BM terhadap Pertumbuhan Ekonomi	82
4.8.4	Pengaruh IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi	85
4.8.5	Pengaruh Covid terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	88

V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Laju Pertumbuhan PDRB Kab/Kota di Lampung 2018-2022 (Persen).....	2
2. Rasio Kemandirian Fiskal Kab/Kota di Lampung 2018-2022 (Persen)	7
3. Upah Minimum Kab/Kota di Wilayah Lampung 2018-2022 (Juta Rupiah).....	10
4. Belanja Modal Kab/Kota di Lampung 2018-2022 (Persen)	12
5. IPM 15 Kab/Kota di Lampung 2018-2022 (Persen)	14
6. Klasifikasi Kemandirian Fiskal.....	31
7. Penelitian Terdahulu	38
8. Data dan Sumber Data	43
9. Ringkasan Perbedaan Bentuk Model	50
10. Hasil Statistik Deskriptif	57
11. Hasil Regresi Uji Chow Menggunakan <i>Fixed Effect Model</i>	60
12. Hasil Regresi Uji Hausman Menggunakan <i>Random Effects Model</i>	61
13. Hasil Regresi Data Panel <i>Fixed Effects Model</i>	62
14. Nilai <i>Individual Effect</i>	64
15. Model Tanpa Retriksi.....	68
16. Model Teretriksi.....	69
17. Hasil Perbandingan Model Terbaik Menggunakan F-Test	70
18. Hasil Perbandingan Model Terbaik Menggunakan AIC, SC, dan HQC.....	71
19. Hasil Uji Heteroskedastisitas	73
20. Hasil Uji Multikolineartitas	74
21. Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)	74
22. Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji-f)	76
23. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	76
24. Hasil Perbandingan KEMFD Sebelum dan Sesudah Covid-19.....	77
25. Hasil perbandingan UMK Sebelum dan Sesudah Covid-19.....	80
26. Hasil Perbandingan BM Sebelum dan Sesudah Covid-19.....	83
27. Hasil Perbandingan IPM Sebelum dan Sesudah Covid-19.....	86
28. Dampak Covid-19 terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung.....	89
29. Hasil Perbandingan Variabel Sebelum dan Sesudah Covid-19	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia (2020-2022)	3
2. Pola Hubungan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	9
3. Kerangka Pemikiran	41
4. Prosedur Pengujian Pemilihan Model	50
5. Hasil Uji Normalitas	72
6. Pengaruh Covid-19 terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Variabel Bebas dan Variabel Terikat.....	101
2. Perhitungan Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD).....	103
3. Hasil Analisis Deskriptif Variabel	105
4. Hasil Uji Chow.....	105
5. Hasil Uji Hausman	105
6. Hasil Regresi Menggunakan <i>Fixed Effect Model</i>	106
7. Hasil Nilai Individual Effect	107
8. Model Tanpa Retriksi.....	107
9. Model Teretriksi.....	108
10. Hasil Perbandingan Model Terbaik Menggunakan F-Test	108
11. Hasil Perbandingan Model Terbaik Menggunakan AIC, SC, dan HQC.....	108
12. Hasil Uji Normalitas	109
13. Hasil Uji Heteroskedastisitas	109
14. Hasil Uji Multikolinearitas.....	109
15. Hasil Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)	110
16. Hasil Uji Pengaruh Simultan (Uji-f)	110
17. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	110
18. Hasil Perbandingan KEMFD Sebelum dan Sesudah Covid-19.....	110
19. Hasil Perbandingan UMK Sebelum dan Sesudah Covid-19.....	110
20. Hasil Perbandingan BM Sebelum dan Sesudah Covid-19.....	111
21. Hasil Perbandingan IPM Sebelum dan Sesudah Covid-19.....	111
22. Dampak Covid-19 terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi Lampung.....	111
23. Hasil Perbandingan Variabel Sebelum dan Sesudah Covid-19	111

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hingga tahun 2022, pemerintah daerah di Indonesia mencapai lebih dari 542 terdiri dari 34 provinsi, 93 kota, serta 415 kabupaten (BPK, 2020). Melihat banyaknya provinsi di Indonesia, pemerintah Indonesia membentuk sebuah desentralisasi serta otonomi daerah dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut mengatur tentang beberapa jenis pelayanan umum yang didalamnya semua pelayanan akan diberikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah dianggap mampu dalam melayani masyarakat karena lebih memahami kondisi internal serta kekurangan yang ada. Otonomi daerah juga diharapkan dapat mampu mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat, dengan otonomi daerah pemerintah daerah dapat mengambil keputusan tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat karena tujuan dari otonomi daerah itu sendiri, agar lebih efisien dan tepat guna. Riyadi (2022) menjelaskan bahwa setiap daerah bebas mengatur urusan daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi menurut teori pertumbuhan Solow-Swan dipengaruhi oleh tingkat modal, tenaga kerja dan teknologi (Afif & Ciptawaty, 2020). Terbentuknya otonomi daerah, diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah Indonesia dan meningkatkan kemandirian fiskal setiap daerah. Pertumbuhan ekonomi juga dapat dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan yang baik (Marselina & Reniza, 2020). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perhitungan pada produk barang dan jasa di dalam satuan tahun tertentu berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas barang harga konstan (BPS, 2021). Salah satu bentuk otonomi daerah yang telah terbentuk di

Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Lampung. Provinsi Lampung pada awalnya merupakan provinsi yang bergabung dengan Sumatera Selatan. Namun pada 18 Maret 1964 Lampung menjadi satu kesatuan provinsi sendiri (Dinas Kominfo Prov. Lampung, 2024). Provinsi Lampung terbagi atas 13 Kabupaten dan 2 Kota. Adanya desentralisasi dan otonomi daerah ini menjadi harapan besar bagi Provinsi Lampung untuk bisa terus meningkatkan perekonomiannya. Salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi adalah PDRB, berikut ini merupakan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung:

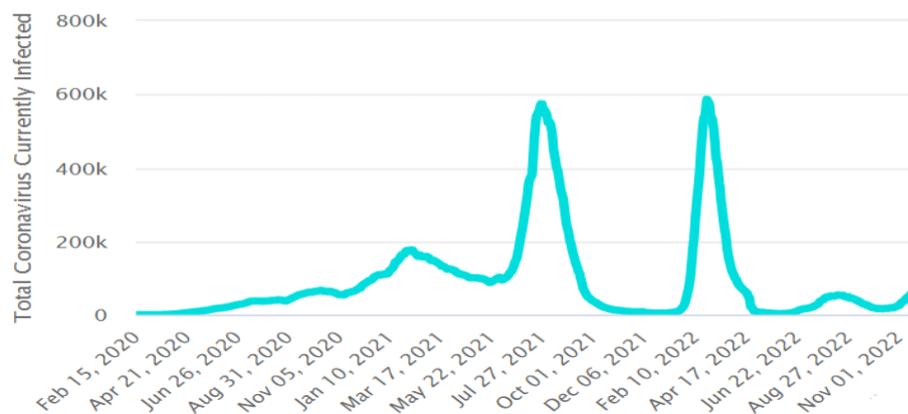
Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Kab/Kota di Lampung 2018-2022 (Persen)

No	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	Mean
1	Lampung Barat	5.09	5.18	-1.16	2.58	4.1	3.158
2	Lampung Selatan	5.23	5.13	-1.73	2.68	4.91	3.244
3	Lampung Tengah	5.33	5.35	-1.02	2.88	4.65	3.438
4	Lampung Timur	3.71	3.79	-2.26	0.24	2.02	1.5
5	Lampung Utara	5.31	5.33	-1.45	2.82	3.16	3.034
6	Mesuji	5.3	5.26	-1.35	2.84	3.49	3.108
7	Pesawaran	5.05	5	-1.26	2.08	4.55	3.084
8	Pesisir Barat	5.33	5.47	-1.18	2.07	2.88	2.914
9	Pringsewu	5.01	5.03	-1.21	2.91	4.37	3.222
10	Tanggamus	5.01	5.02	-1.77	2.34	4.16	2.952
11	Tulang Bawang	5.42	5.41	-1.34	2.88	3.92	3.258
12	Tulang Bawang Barat	5.27	5.36	-1.32	2.89	4.49	3.338
13	Way Kanan	5.18	5.17	-1.16	2.9	4.41	3.3
14	Bandar Lampung	6.2	6.17	-1.88	3.1	4.95	3.708
15	Metro	5.68	5.57	-1.79	2.91	4.51	3.376
16	Provinsi Lampung	5.20	5.216	-1.45	2.54	4.03	3.108

Sumber: BPS, 2024

Tabel 1. menunjukkan pertumbuhan PDRB di 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selama 5 tahun (2018-2022). Kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan laju pertumbuhan PDRB terbesar, tercatat selama lima tahun dapat menyentuh rata-rata sebesar 3,71% sedangkan Kabupaten Lampung Timur menjadi daerah dengan rata-rata tingkat pertumbuhan PDRB terendah yaitu hanya sekitar 1,5%. Pada tahun 2020, Indonesia umumnya dan Provinsi Lampung pada khususnya mengalami kondisi yang paling menurun dari setiap tahunnya. Di mana pandemi covid-19 melanda dan menyebabkan penurunan pertumbuhan PDRB secara drastis. Dapat terlihat bahwa masih ada peningkatan sebelum terjadinya covid-19 di tahun 2018-2019. Di tahun 2021 Provinsi Lampung

mengalami pemulihan ekonomi yang dapat mendorong laju pertumbuhan PDRB walaupun belum pulih seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2022 kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Provinsi Lampung juga akan menjadi penentu kebijakan pembangunan bagi para pemegang kebijakan terutama di daerah-daerah untuk menggerakkan seluruh sektor perekonomiannya (Emalia & Farida, 2018).



Sumber: Worldometer, 2022

Gambar 1. Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia (2020-2022)

Kasus pandemi covid-19 yang melanda Indonesia hingga ke seluruh daerah membawa dampak yang begitu besar. Covid-19 memicu penurunan drastis dalam aktivitas ekonomi. Pembatasan sosial, penutupan usaha, dan gangguan dalam rantai pasokan global menyebabkan penurunan tajam pada produksi, konsumsi, dan perdagangan. Banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami kontraksi ekonomi di tahun 2020. Sektor-sektor seperti pariwisata, transportasi, dan manufaktur menjadi yang paling terdampak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07% pada tahun 2020. Ini merupakan resesi ekonomi pertama sejak krisis keuangan Asia 1998.

Menurut Laporan Resmi Pemerintah, tampak data terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia pada 2020 sebesar 743.198 kasus, lalu total kematian sebesar 22.138. Tahun 2021, kasus terkonfirmasi sebesar 4.262.540 kasus, dengan 144.094

kematian. Tahun 2021 juga merupakan puncak gelombang kedua akibat varian *Delta*. Pada tahun 2022, kasus terkonfirmasi sebanyak 6.720.490 kasus dengan kematian 160.451. Tahun 2022, terdapat vaksinasi masif dan varian *Omicron* yang mempengaruhi jumlah kasus dan penanganan.

Pandemi menyebabkan penurunan penerimaan negara dari sektor pajak karena turunnya pendapatan perusahaan dan rumah tangga. Banyak perusahaan tutup atau mengurangi operasional, sehingga berkurangnya pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN). Penurunan aktivitas ekonomi juga berdampak pada penerimaan dari sektor non-pajak seperti pendapatan negara dari sumber daya alam. Defisit anggaran melebar karena penerimaan negara menurun sementara pengeluaran meningkat untuk mendanai penanganan kesehatan dan stimulus ekonomi. Defisit anggaran mencapai 6,1% dari PDB pada 2020, jauh di atas batas normal 3%.

Untuk menghadapi dampak ekonomi, pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, menerapkan kebijakan fiskal ekspansif. Ini termasuk paket stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung sektor usaha, dan memperkuat sistem kesehatan. Pengeluaran pemerintah difokuskan pada bantuan sosial, dukungan UMKM, subsidi, serta insentif fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pemerintah meluncurkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang mengalokasikan triliunan rupiah untuk bantuan sosial, subsidi UMKM, insentif pajak, dan belanja kesehatan. Karena penerimaan menurun dan pengeluaran meningkat, banyak negara, termasuk Indonesia, terpaksa mengambil utang lebih besar untuk membiayai defisit fiskal. Ini meningkatkan beban utang negara dan menciptakan tantangan dalam pengelolaan fiskal di masa mendatang. Utang pemerintah meningkat signifikan dengan rasio utang terhadap PDB naik menjadi sekitar 39,4% pada tahun 2020, dibandingkan dengan 30,5% pada tahun 2019.

Pandemi memaksa pemerintah untuk mereformasi kebijakan fiskal jangka panjang, termasuk perbaikan sistem perpajakan dan pengelolaan utang yang lebih hati-hati. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat basis fiskal negara dan

mencegah ketergantungan berlebih pada utang. Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 untuk memberi fleksibilitas lebih dalam pengelolaan anggaran selama krisis. Pandemi Covid-19 telah mengubah banyak aspek ekonomi dan kebijakan fiskal, memaksa negara-negara untuk menyeimbangkan antara penanganan krisis jangka pendek dan perencanaan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Hasil dari laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung mengalami jeglakan yang tajam. Maka dari itu, dalam penggunaan variabel penelitian dibutuhkan variabel dummy guna melihat pengaruh dari sebelum dan sesudah adanya covid-19 ini.

Terdapat beberapa indikator yang dapat menjadi alat dalam mengukur performa pertumbuhan PDRB, satu diantaranya tingkat kemandirian keuangannya (Sugiyanto & Musfirati, 2021). Kemandirian fiskal dapat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatannya berupa PAD yang lebih besar dibandingkan dana pendapatan transfer termasuk dari pemerintah pusat (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). Jika masing-masing daerah akan mampu berdiri secara mandiri maka setiap pembiayaan dan pembangunan serta dalam pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan baik tanpa tergantung dari dana transfer dari pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 menjelaskan tentang kemandirian fiskal yang mana di dalamnya disebutkan bahwa konsekuensi dari otonomi daerah adalah pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu otonomi daerah harus didukung dengan peningkatan kemampuan fiskal daerah.

Peta kapasitas fiskal yang teratur dalam PMK No.193 tahun 2022 menjelaskan bahwa kemandirian fiskal daerah merupakan kemampuan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan. Penerapan desentralisasi fiskal dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah akan semakin diperkuat. Hadirnya kemandirian fiskal daerah akan menjadi tuntutan dalam menggali berbagai unsur untuk meningkatkan PAD (Sundjoto et

al., 2016). Sikap yang responsif dan peduli pada potensi daerah juga menjadi tugas utama dari pemerintah daerah (Soukotta et al., 2023). Adapun hasil penelitian dari Maryanti et al., (2023) yaitu terkait dengan dampak dari kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Riau yang berpengaruh secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Riau. Artinya semakin tinggi kemampuan keuangan daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Kemandirian fiskal daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, berbagai pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat melalui PAD sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian fiskal juga ditunjukkan melalui besar kecilnya perbandingan antar PAD dengan pendapatan daerah berdasarkan sumber lainnya seperti bantuan pemerintah dari pusat. Semakin besar tingkat kemandirian fiskal daerah maka semakin meningkatnya pertumbuhan PDRB di suatu daerah (DJPK, 2024). Derajat kemandirian fiskal membuktikan bahwa setiap daerah mampu membiayai sendiri berbagai kegiatan di dalamnya dengan dana yang diperoleh dari PAD dibandingkan dana yang berasal dari bantuan pemerintah pusat dan pinjaman (Zukhri, 2020).

Semakin besar rasio atau derajat kemandirian keuangan suatu daerah menggambarkan bahwa semakin menurun ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah yang semakin tinggi juga mengindikasikan bahwa semakin tinggi keterlibatan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pembangunan melalui otonomi daerah. Adapun rasio kemandirian fiskal daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebagai berikut:

Tabel 2. Rasio Kemandirian Fiskal Kab/Kota di Lampung 2018-2022 (Persen)

No	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	Mean	Pola
1	Lampung Barat	5.22	7.1	8.65	8.46	8.08	7.502	
2	Lampung Selatan	12.92	16.12	17.14	18.82	18.22	16.644	
3	Lampung Tengah	8	9.19	9.29	11.82	9.96	9.652	
4	Lampung Timur	7.23	8.44	11.51	9.11	11.07	9.472	
5	Lampung Utara	7.03	6.87	7.88	7.79	4.74	6.862	
6	Mesuji	5.39	7.05	8.92	8.08	9.65	7.818	
7	Pesawaran	5.23	7.34	6.71	8.03	7.97	7.056	Instruktif
8	Pesisir Barat	4.1	4.26	4.81	4.13	4.29	4.318	
9	Pringsewu	7.38	8.73	10.03	11	13.14	10.056	
10	Tanggamus	4.24	5.34	7.11	6.93	7.82	6.288	
11	Tulang Bawang	6.46	8.55	9.61	11.21	13.06	9.778	
12	Tulang Bawang Barat	3.34	4.71	6.51	6.29	6.98	5.566	
13	Way Kanan	5.55	5.25	6	6.4	6.7	5.98	
14	Bandar Lampung	40.31	44.5	39.49	41.65	46.25	42.44	Konsultif
15	Metro	20.35	26.59	35.66	46.29	40.39	33.856	Konsultif

Sumber: DJPK, 2024 (Data Diolah Penulis)

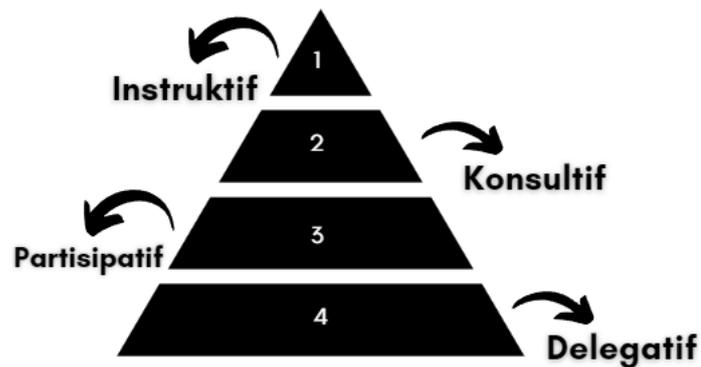
Tabel 2. menunjukkan rasio dari kemandirian fiskal daerah yang ada di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung selama 5 tahun (2018-2022). Terdapat cara dalam mengukur dan mengetahui pola hubungan serta tingkat kemandirian fiskal daerah menurut Departemen dalam negeri Republik Indonesia melalui Keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri), Tahun 2022 antara lain: Jika kurang dari 25% maka suatu daerah berada pada kondisi belum mandiri (instruktif). Pada tingkat 25% - 50% daerah tersebut mulai menuju pada kemandirian (konsultif). Jika pada angka 50% - 75% suatu daerah berada pada kondisi sudah mandiri (partisipatif). Pada tingkat 75% – 100% daerah sudah sangat mandiri (delegatif) yang mana PAD lebih besar dibandingkan dana bantuan dari transfer pusat. Data di atas menunjukkan bahwa kota Bandar Lampung dan Kota Metro berada pada kondisi menuju kemandirian (pola konsultif), sedangkan 13 Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung masih berada pada kondisi belum mandiri (pola instruktif). Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi kabupaten dengan tingkat menandirian paling rendah diantara semua Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari pendapatan asli daerah yang belum mencukupi ditambah dengan ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat yang masih sangat tinggi. Kondisi ini menjadi perhatian bagi

semua pemerintah daerah yang ada di Provinsi Lampung dalam meningkatkan peta kapasitas fiskalnya masing-masing.

Penyediaan dalam jumlah banyak jasa dan barang kebutuhan masyarakat sehingga memungkinkan naiknya standar hidup dan juga memengaruhi kemandirian fiskal suatu daerah disebut pertumbuhan ekonomi. Terdorongnya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut didapat dari pengelolaan secara efisien, efektif, dan ekonomis suatu daerah. Hal ini karena pada kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah tersebut tidak/kurang ada nya intervensi. Pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya akan mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan rasio kemandirian fiskal, meningkatkan belanja untuk infrastruktur, dan dapat juga meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik dalam jangka panjang (Nurhayati et al., 2023).

Kemampuan keuangan daerah di Provinsi Lampung harus menjadi daerah yang mampu melakukan otonomi daerah, artinya pemerintah daerah di Lampung harus mampu mengelola keuangan dan sumber daya yang dimiliki. Mengelola serta menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk bisa membiayai serta menyelenggarakan kegiatan pemerintahan daerahnya (Afif & Ciptawaty, 2020). Hal ini selaras dengan arah pembangunan wilayah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) untuk tahun 2020-2024 yaitu peningkatan pemerataan antar wilayah, meningkatkan pusat pertumbuhan wilayah melalui peningkatan keunggulan kompetitif, meningkatkan kualitas dan pelayanan dasar, daya saing serta kemandirian wilayah, meningkatkan sinergitas pemanfaatan ruangan dan wilayah (Maryanti et al., 2023).

Terdapat beberapa pola hubungan yang terbentuk secara konseptual antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembentukan pola ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kemandirian keuangan suatu daerah mampu membiayai pelaksanaan dari pembangunan (Prakoso et al., 2019).



Gambar 2. Pola Hubungan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pembentukan pola hubungan ini dinamakan sebagai hubungan situasional berdasarkan pelaksanaan otonomi daerahnya, yaitu:

1. Pola Instrukturif, pemerintah pusatnya berperan lebih besar;
2. Pola Konsultif, pemerintah pusat sudah mulai mengurangi campur tangan di dalamnya;
3. Pola Partisipatif, pemerintah daerah dapat meningkatkan sendiri kemandiriannya dan mendekat ke mampu menjalankan otda;
4. Pola Delegatif, PAD yang dihasilkan lebih besar dibandingkan pendapatan transfernya dari pusat.

Provinsi Lampung sendiri masih berada pada posisi pola konsultif di mana peran dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung sudah sedikit lebih mampu melaksanakan otonominya. Hal ini juga didukung dengan faktor ekonomi berupa penambahan nilai pada perkebunan dan pertanian, serta faktor pariwisata. Namun, tidak semua pemerintah daerah di Provinsi Lampung berada pada kondisi mandiri, masih banyak juga daerah di Provinsi Lampung yang mengandalkan bantuan pemerintah pusat serta semakin bergantung pada pemerintahan pusat. Akibatnya daerah tersebut tidak mampu secara mandiri membangun kapasitas publik berupa layanan serta fasilitasnya.

Salah satu upaya dalam meningkatkan kemandirian fiskal suatu daerah yaitu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Adapun cara dalam menumbuhkan ekonomi suatu daerah yaitu dengan pembentukan kebijakan upah minimum. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Cipta

Kerja No.6 tahun 2023, bahwa upah merupakan hal yang diterima dalam sebagai imbalan dari pemberi kerja. Gubernur sebagai kepala tertinggi sebuah daerah akan membentuk sebuah batasan upah minimum dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) (Putri, 2022). Kenaikan upah minimum ini akan mampu meningkatkan daya beli pekerja serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Berikut ini adalah besaran dari upah minimum kabupaten/kota yang dihasilkan oleh 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung:

Tabel 3. Upah Minimum Kab/Kota di Wilayah Lampung 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lampung Barat	2.2	2.3	2.5	2.5	2.5
2	Lampung Selatan	2.2	2.4	2.6	2.7	2.7
3	Lampung Tengah	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4
4	Lampung Timur	2.1	2.2	2.4	2.4	2.4
5	Lampung Utara	2.1	2.3	2.5	2.5	2.5
6	Mesuji	2.1	2.4	2.6	2.7	2.7
7	Pesawaran	2.1	2.2	2.4	2.4	2.4
8	Pesisir Barat	2.1	2.2	2.4	2.4	2.4
9	Pringsewu	2.1	2.2	2.4	2.4	2.4
10	Tanggamus	2.1	2.2	2.4	2.4	2.4
11	Tulang Bawang	2.1	2.3	2.4	2.4	2.4
12	Tulang Bawang Barat	2.1	2.3	2.5	2.5	2.5
13	Way Kanan	2.2	2.4	2.6	2.6	2.6
14	Bandar Lampung	2.3	2.4	2.7	2.7	2.7
15	Metro	2.1	2.2	2.4	2.4	2.5
16	Provinsi Lampung	2.1	2.2	2.4	2.4	2.4

Sumber: DJPK, 2024 (Data Diolah Penulis)

Tabel 3. menunjukkan upah minimum kabupaten/kota 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selama 5 tahun (2018-2022). Terdapat cara dalam mengukur perhitungan upah minimum berdasarkan UU Cipta Kerja yaitu mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Data di atas menunjukkan bahwa semua Kabupaten/Kota berada pada tingkat upah minimum dibawah 2.8 juta rupiah. UMK tertinggi yaitu sebesar 2.7 juta rupiah, terjadi di Bandar Lampung tahun 2022 sedangkan UMK terendah sebesar 2.1 juta rupiah terjadi di banyak kabupaten dan 1 kota yaitu Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu,

Tanggamus, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan dan Kota Metro pada tahun 2018. Hal ini masih menjadi perhatian bersama bahwasannya penghasilan dari upah minimum kabupaten/kota di Lampung tergolong rendah dibanding provinsi yang ada di Sumatera lainnya. Tercatat pada tahun 2021 Kabupaten/Kota di Bangka Belitung mampu menembus UMK sebesar 3.2 juta rupiah.

Pemerintah daerah mampu menjamin kesejahteraan dan perlindungan kepada para pekerja dengan pembentukan upah minimum sehingga terjadi pemerataan distribusi pendapatan. Angeles-Castro dkk., (2014) menjelaskan bahwa tingkat upah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pada pasar tenaga kerja, peningkatan upah minimum dinilai dapat merangsang seseorang untuk berlomba-lomba di pasar tenaga kerja. Adanya peningkatan upah minimum menyebabkan daya beli masyarakat turut mengalami peningkatan. Ketika daya beli meningkat maka akan mendorong kenaikan pertumbuhan. Kebijakan upah minimum dinilai memiliki keterkaitan dengan kondisi perekonomian suatu daerah. Artinya, semakin baik kondisi perekonomian suatu daerah, maka semakin meningkat pula pertumbuhan ekonomi daerah tersebut sehingga penentuan tingkat upah juga semakin meningkat (Murniati, 2018). Dari adanya fenomena yang terjadi, urgensi modal manusia menjadi aset fundamental bagi suatu negara dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang dapat menumbuhkan perekonomian wilayah dengan memperhatikan aspek-aspek lainnya. Tentu hal ini tidak terlepas dari adanya intervensi pemerintah dalam memajukan pembangunan kualitas modal manusia.

Kenaikan upah minimum tidak dapat disamakan antar daerah karena melihat pada daya beli masing-masing daerah, pertumbuhan ekonominya, tingkat inflasi daerah serta kebutuhan hidup para pekerja di dunia usaha. Beberapa daerah di Pulau Jawa menghitung formula UMK berdasarkan KHL karena dianggap mampu melihat dasar kehidupan siklus pekerja. Faktor lain dalam pembentukan upah yaitu dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Jika PDRB meningkat hal ini menunjukkan telah berkembangnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena output akan

mempengaruhi keuntungan yang akan dihasilkan. Ketika keuntungan di suatu daerah meningkat, maka upah juga akan ikut meningkat (Pangestuti, 2019).

Pendapatan per kapita menjadi faktor terakhir dalam penentu kebijakan upah minimum. Hal ini akan menunjukkan tingkat kemakmuran suatu daerah yang mana akan berdampak terhadap penentuan upah minimum. Konsep pembentukan pendapatan per kapita ini melalui konsumen yang dapat membeli barang dan jasa yang telah disajikan oleh produsen sehingga dapat meningkatkan keuntungan bagi perusahaan yang akan berpengaruh terhadap upah pekerja. Maka dari itu, besar kecil dari pembentukan upah dipengaruhi oleh seberapa tinggi tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Nurtiyas, 2016). Permasalahan yang sering terjadi pada pembentukan upah ialah disparitas dari jumlah yang dibutuhkan. Adapun faktor yang mempengaruhinya yaitu kepadatan ekonomi, teknologi yang berkembang, inflasi dan cepatnya perputaran ekonomi akan mempengaruhi besar kecilnya upah yang diberikan. Teori klasik menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga bisa dipengaruhi oleh modal sebagai faktor utama di dalamnya. Modal sendiri dapat berasal dari investasi di luar maupaun di dalam negeri (Fazaalloh, 2019). Berikut ini merupakan belanja modal di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung:

Tabel 4. Belanja Modal Kab/Kota di Lampung 2018-2022 (Persen)

No	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022	Mean
1	Lampung Barat	100.18	96.36	66.6	95.14	105.27	92.71
2	Lampung Selatan	74.12	71.01	58.39	105.02	131.81	88.07
3	Lampung Tengah	51.06	90.34	64.81	125.71	99.96	86.376
4	Lampung Timur	99.79	69.71	80.08	73.01	66.9	77.898
5	Lampung Utara	46.41	47.72	41.28	82.13	130.04	69.516
6	Mesuji	92.33	78.28	73.03	100.85	72.69	83.436
7	Pesawaran	80.43	83.85	77.27	87.86	54.78	76.838
8	Pesisir Barat	106.26	94.9	96.05	90.66	88.33	95.24
9	Pringsewu	93.47	90.29	66.09	83.71	104.06	87.524
10	Tanggamus	85.16	86.16	68.77	55.84	87.74	76.734
11	Tulang Bawang	80.43	63.27	57.53	76.02	67.43	68.936
12	Tulang Bawang Barat	80.66	77.31	79.84	130.53	94.72	92.612
13	Way Kanan	103.48	99.84	52.47	86.51	97.37	87.934
14	Bandar Lampung	102.28	68.33	43.14	134.12	158.4	101.254
15	Metro	109.13	102.19	89.85	87.94	108.39	99.5
16	Provinsi Lampung	79.737	74.491	61.69	88.474	90.633	79.0052

Sumber: DJPK, 2024 (Data Diolah Penulis)

Tabel 4. menunjukkan hasil dari Belanja Modal 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selama 5 tahun (2018-2022). Adapun perhitungan dari belanja modal adalah hasil realiasi dari belanja modal dibagi dengan total pendapatan daerah dikalikan dengan 100%. Hasil belanja modal terbesar di dapatkan oleh Kota Bandarlampung dengan rata-rata belanja modal sebesar 101,254% dan hasil belanja modal terkecil diraih oleh Kabupaten Tulang Bawang dengan rata-rata belanja modal hanya sebesar 68,94%. Belanja modal dapat diartikan sebagai pembelanjaan oleh pemerintah daerah guna menambah asset tetap yang memberikan manfaat dalam jangka panjang (Gosal et al., 2022). Hubungan antara belanja modal dan pertumbuhan ekonomi ketika belanja modal naik maka pertumbuhan ekonomi akan naik juga (Maury et al., 2023). Dari data yang sudah dipaparkan di atas, sudah banyak kabupaten/kota di Provinsi Lampung yang mengalami peningkatan belanja modal secara signifikan. Seharusnya dengan meningkatnya belanja langsung berupa belanja modal ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kemandirian fiskal di semua daerah Provinsi Lampung. Namun pada kenyataannya, masih banyak terjadi ketimpangan, ketergantungan fiskal, serta rendahnya kemandirian fiskal di 15 Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Belanja modal dapat dialokasikan sebagai dasar kebutuhan daerah untuk sarana dan prasarana tiap daerah. Pada realitanya masih banyak penggunaan belanja daerah yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja harus dapat digunakan dengan produktif seperti peningkatan program layanan publik, peningkatan aktivitas pembangunan, serta menstimulasi perekonomian. Hal tersebut dapat berimplikasi pada peningkatan penerimaan daerah sehingga kapasitas fiskal dapat meningkat dan kesenjangan fiskal dapat diminimalisir. Maka dari itu, jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dapat melalui peningkatan belanja modal. Pemerintah daerah harus berupaya keras dalam menggali PAD sebesar-besarnya (Hasibuan et al., 2023).

Tabel 5. IPM 15 Kab/Kota di Lampung 2018-2022 (Persen)

No	Wilayah	2018	2019	2020	2021	2022
1	Lampung Barat	66.74	67.5	67.8	67.9	68.39
2	Lampung Selatan	67.68	68.22	68.36	68.49	69
3	Lampung Tengah	69.73	70.04	70.16	70.23	70.8
4	Lampung Timur	69.04	69.34	69.37	69.66	70.58
5	Lampung Utara	67.17	67.63	67.67	67.89	68.33
6	Mesuji	62.88	63.52	63.63	64.04	64.94
7	Pesawaran	64.97	65.75	65.79	66.14	66.7
8	Pesisir Barat	62.96	63.79	63.91	64.3	65.14
9	Pringsewu	69.42	69.97	70.3	70.45	70.98
10	Tanggamus	65.67	66.37	66.42	66.65	67.22
11	Tulang Bawang	67.7	68.23	68.52	68.73	69.53
12	Tulang Bawang Barat	65.3	65.93	65.97	66.22	67.13
13	Way Kanan	66.63	67.19	67.44	67.57	68.04
14	Bandar Lampung	76.63	77.33	77.44	77.58	78.01
15	Metro	76.22	76.77	77.19	77.49	77.89
16	Provinsi Lampung	69.02	69.57	69.69	69.9	70.45

Sumber: BPS, 2024 (Data Diolah Penulis)

Tabel 5. menunjukkan hasil dari Indeks Pembangunan Manusia 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung selama 5 tahun (2018-2022). Adapun perhitungan dari IPM adalah $1/3$ dikali dengan indeks harapan hidup ditambah tingkat pendidikan ditambah dengan standar hidup layak yang menggunakan indikator kemampuan daya beli. IPM terbesar diraih oleh Kota Bandar Lampung dengan IPM sebesar 78.01% pada tahun 2022 sedangkan IPM terendah diraih oleh Kabupaten Mesuji sebesar 62.88% pada tahun 2018. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu faktor dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi. IPM akan mampu mendorong pertumbuhan ekononomi melalui beberapa indikator di dalamnya berupa pembangunan sosial ekonomi Negara dan kombinasi modal manusia (bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan pendapatan riil perkapita). Hal ini akan berpengaruh pada taraf hidup kualitas fisik maupun non-fisik penduduk melalui pendidikan, kesehatan, dan indikator ekonomi di dalamnya (Suliswanto, 2012). Tingginya tingkat pembangunan manusia akan menentukan kemampuan masyarakat dalam mengelola dan menyerap sumber ekonomi dengan baik, tingginya tingkat kualitas manusia di dalamnya maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Maka dari itu, manusia menjadi kunci utama dalam mengembangkan kekayaan bangsa. Sumber daya manusia yang tersedia baik fisik maupun non-fisik akan menjadi kemampuan

dasar masyarakat. Pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi akan bekerjasama serta saling berkaitan (Dewi & Sutrisna, 2014).

UNDP (*United Nations Development Programme*) pada tahun 2010 memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baru. IPM melihat pada perhitungan standar hidup berupa pendidikan dan kesehatan. Modala manusia yang terjalin di dalamnya serta keterampilan menjadi hal penting bagi pertumbuhan ekonomi. Pembangunan manusia berada pada arah positif untuk kesejahteraan sebagai pondasi utama pembangunan. Adapun manfaat dari IPM yaitu untuk mengukur keberhasilan kualitas pembangunan, menjadi alokator pembentukan Dana Alokasi Umum (DAU), serta mampu menentukan tingkatan (peringkat) dari pembangunan wilayah/Negara. Sebuah Negara jika memiliki tingkat IPM yang tinggi maka mempunyai tingkat kesuksesan pembangunan manusia yang baik. Setiap penambahan penduduk mampu bersaing secara sehat serta bisa memperbesar pasar tenaga kerja yang memungkinkan menambah jumlah produksi. Perkembangan penduduk serta dorongan dari produk nasional yang dihasilkan mampu menjadi faktor pertumbuhan ekonomi yang sangat penting. Sumber daya manusia (*human resource*) ini menjadi kunci utama keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi.

Oleh karenanya, penelitian terkait dengan kemandirian fiskal daerah, upah minimum kabupaten/kota, belanja modal, dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk dilakukan agar pertumbuhan ekonomi terus berjalan maju, dapat dipetakan pada setiap daerah di Provinsi Lampung, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan kemakmuran Provinsi Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Sejumlah rumusan masalah studi ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) serta perbedaan pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
2. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Upah Minimum Kab/Kota (UMK) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) serta perbedaan pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
3. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Belanja Modal (BM) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) serta perbedaan pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
4. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) serta perbedaan pada 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
5. Apakah terdapat perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi covid-19?
6. Apakah terdapat hubungan yang signifikan secara bersama-sama Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Belanja Modal (BM), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung?
7. Apakah variabel Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Belanja Modal (BM), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu menjelaskan variasi nilai-nilai Pertumbuhan Ekonomi (PE) 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejumlah tujuannya studi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan signifikansi antara Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung secara parsial.

2. Untuk mengetahui hubungan signifikansi antara Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung secara parsial.
3. Untuk mengetahui hubungan signifikansi antara Belanja Modal (BM) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung secara parsial.
4. Untuk mengetahui hubungan signifikansi antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pertumbuhan Ekonomi (PE) 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung secara parsial.
5. Untuk mengetahui perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sebelum dan sesudah pandemi covid-19.
6. Untuk mengetahui hubungan signifikansi Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Belanja Modal (BM), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung secara simultan.
7. Untuk mengetahui seberapa pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Belanja Modal (BM), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu menjelaskan variasi nilai-nilai Pertumbuhan Ekonomi (PE) 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Kebermanfaatan studi ini sebagai berikut:

1. Sebagai wadah untuk memperluas pengetahuan dan wawasan terkait Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Belanja Modal (BM), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
2. Menjadi sarana guna memperbaiki penelitian-penelitian terdahulu serta menjadi bukti empiris terhadap variabel yang digunakan di setiap metode penelitian.

3. Menjadi sarana untuk mendorong dan memberikan masukan setiap pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota di Indonesia.
4. Diharapkan dengan hadirnya penelitian ini dapat berguna sebagai pengumpulan bahan informasi atau *sample* dalam penelitian selanjutnya untuk menghasilkan temuan-temuan yang bermanfaat dalam jangka panjang serta sesuai dengan kebutuhan data yang berlaku.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Peran dan Fungsi Pemerintah

Pemerintah sangat berperan penting dalam pembentukan dan peningkatan kapasitas masing-masing daerah di Indonesia. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah menjelaskan bahwa peran pemerintah menjadi besar dalam mengurus pemerintahannya termasuk di dalamnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembentukan desentralisasi mendorong setiap pemerintahan memberikan berbagai kewenangan, keleluasaan, dan peraturan tersendiri di setiap daerah guna membangun dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi berdasarkan potensi daerahnya masing-masing. Sejak berlakunya otonomi daerah sampai saat ini masih banyak daerah-daerah yang pembangunan dan pertumbuhan ekonominya tidak meningkat padahal potensi daerah sangat memungkinkan untuk dikembangkan. Banyak sekali kendala yang dihadapi berbagai pemerintah daerah. Teori yang berkembang dari para ahli ekonom, serta langkah dan strategi yang sudah ditawarkan menjadi penyesuaian bagi pemangku kebijakan daerah guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah. Teori harus dijalankan dan disesuaikan dengan permasalahan pada daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan bukti lapangan serta data empiris yang terjadi di daerah, hal yang paling mendasar yaitu peran dari pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam membangun perekonomian daerah. Pembangunan ekonomi daerah melalui mekanisme pengambilan keputusan dari para pemangku kebijakan diharapkan dapat membantu permasalahan-permasalahan yang muncul dari adanya ketimpangan alokasi sumber daya dalam pembangunan ekonomi daerah.

Penerapan pembangunan ekonomi daerah biasanya dikaitkan dengan kebijakan ekonomi daerah tersebut, kebijakan daerah tertentu akan berbeda dengan kebijakan daerah yang lainnya karena setiap daerah mempunyai kelebihan dan kekurangan terhadap potensi kekayaan alam serta sumber-sumber yang lainnya, keputusan politik dan kebijakan pembangunan ekonomi daerah dikaitkan dengan pembangunan ekonomi nasional secara keseluruhan. Dengan secara tidak langsung yang dapat mendukung dalam pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh daerah menjadi prioritas pembangunan nasional contohnya yaitu pendidikan, kesehatan dll (Djadjuli, 2018).

Richard A. Musgrave adalah salah satu tokoh ekonomi yang paling berpengaruh dalam teori ekonomi publik. Dalam bukunya *Public Finance in Theory and Practice* (1959), Musgrave mengemukakan tiga fungsi utama pemerintah dalam perekonomian yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Ketiga fungsi ini saling terkait dalam mengelola ekonomi nasional dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Berikut penjelasan mendalam mengenai setiap fungsi:

1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi pemerintah berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa publik yang tidak disediakan secara optimal oleh pasar. Pasar bebas cenderung mengabaikan barang-barang publik karena sifatnya yang non-rival (konsumsi satu orang tidak mengurangi konsumsi orang lain) dan non-eksklusif (tidak ada individu yang bisa dikecualikan dari menikmati manfaat barang tersebut). Oleh karena itu, pemerintah harus campur tangan untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Peran Pemerintah dalam Fungsi Alokasi:

- **Penyedia Barang Publik:** Pemerintah menyediakan barang dan jasa yang tidak disediakan oleh sektor swasta, seperti jalan raya, pertahanan, penerangan umum, dan sistem hukum. Barang-barang ini diperlukan untuk kepentingan umum, tetapi pasar tidak memiliki insentif untuk menyediakannya karena tidak dapat menghasilkan keuntungan dari penggunaannya.

- Intervensi dalam Kegagalan Pasar: Pemerintah juga berperan untuk mengatasi kegagalan pasar, seperti eksternalitas. Contoh eksternalitas negatif adalah polusi, di mana perusahaan swasta mungkin tidak mempertimbangkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pemerintah dapat memberlakukan regulasi atau pajak untuk mengurangi eksternalitas ini.
- Pengembangan Infrastruktur: Pemerintah mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur yang penting bagi perekonomian, seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi. Investasi dalam infrastruktur meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Penyediaan Subsidi: Pemerintah dapat memberikan subsidi untuk mendorong produksi atau konsumsi barang-barang yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat, seperti subsidi pangan, pendidikan, dan kesehatan.

2. Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi pemerintah berhubungan dengan upaya mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial melalui kebijakan yang mengatur bagaimana pendapatan dan kekayaan didistribusikan di masyarakat. Pasar bebas sering kali menciptakan ketimpangan yang besar antara kelompok kaya dan miskin. Oleh karena itu, pemerintah perlu campur tangan untuk memastikan distribusi yang lebih adil. Peran Pemerintah dalam Fungsi Distribusi:

- Redistribusi Pendapatan: Pemerintah menggunakan mekanisme pajak progresif, di mana orang dengan pendapatan lebih tinggi membayar pajak lebih besar secara proporsional, untuk mendanai program kesejahteraan sosial yang membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Pajak ini dapat digunakan untuk memberikan bantuan langsung tunai, subsidi kesehatan, pendidikan gratis, dan jaminan sosial.
- Program Kesejahteraan Sosial: Program seperti jaminan hari tua, asuransi pengangguran, dan bantuan sosial merupakan instrumen utama pemerintah dalam fungsi distribusi. Program-program ini bertujuan untuk memastikan

bahwa individu yang kurang mampu atau yang rentan secara ekonomi tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka.

- Subsidi dan Bantuan Pemerintah: Pemerintah juga memberikan subsidi kepada kelompok rentan atau masyarakat miskin, seperti subsidi pangan, bahan bakar, atau perumahan, untuk memastikan akses yang adil terhadap barang dan jasa penting.
- Kebijakan Upah Minimum: Untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan memastikan standar hidup yang layak, pemerintah menetapkan kebijakan upah minimum. Ini merupakan bentuk intervensi langsung dalam pasar tenaga kerja untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

3. Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi pemerintah adalah menjaga stabilitas ekonomi dengan mengurangi fluktuasi siklus ekonomi, menjaga tingkat inflasi yang rendah, mengurangi pengangguran, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pasar bebas cenderung mengalami siklus ekonomi berupa resesi (penurunan aktivitas ekonomi) dan inflasi (kenaikan harga secara umum). Peran pemerintah dalam fungsi ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan makroekonomi. Peran Pemerintah dalam Fungsi Stabilisasi:

- Kebijakan Fiskal: Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian. Kebijakan ini mencakup pengeluaran pemerintah dan pajak. Ketika ekonomi sedang lesu, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran atau mengurangi pajak untuk mendorong konsumsi dan investasi. Sebaliknya, ketika inflasi tinggi, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak untuk mengendalikan permintaan.
- Kebijakan Moneter: Melalui bank sentral, pemerintah juga memainkan peran penting dalam mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Ketika inflasi tinggi, bank sentral dapat menaikkan suku bunga untuk mengurangi uang beredar. Sebaliknya, dalam kondisi resesi, suku bunga dapat diturunkan untuk merangsang pinjaman dan investasi.

- Pengendalian Inflasi: Pemerintah harus menjaga agar inflasi tetap terkendali, karena inflasi yang terlalu tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat. Pemerintah bisa melakukan intervensi dengan cara mengendalikan harga-harga komoditas penting atau menggunakan kebijakan moneter seperti yang disebutkan sebelumnya.
- Mengurangi Pengangguran: Pemerintah dapat menciptakan lapangan kerja melalui proyek-proyek publik dan program-program pelatihan untuk mengurangi tingkat pengangguran, terutama selama masa-masa resesi.
- Stabilitas Keuangan: Pemerintah juga berperan dalam menjaga stabilitas sektor keuangan, misalnya dengan mengatur perbankan, mengawasi pasar modal, dan mencegah terjadinya krisis keuangan yang bisa berdampak sistemik terhadap ekonomi secara keseluruhan.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengalokasikan sumber daya untuk menyediakan barang-barang publik dan menangani kegagalan pasar. Selain itu, fungsi distribusi pemerintah bertujuan untuk memastikan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan melalui redistribusi pendapatan. Fungsi stabilisasi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi makro dengan mengendalikan inflasi, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga fungsi ini saling terkait dan merupakan inti dari peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan dan kesejahteraan ekonomi.

2.1.2 Teori Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwasannya ketika berada pada otonomi daerah beberapa pelayanan umum akan diserahkan kepada pemerintah daerah, sebab pemerintah daerah lebih memahami kondisi masyarakatnya dibandingkan pemerintah pusat. Besar harapan dari pembentukan otonomi daerah ini mampu menumbuhkan percepatan dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah mampu mengambil keputusan dengan sebaik-baiknya tanpa mendapat persetujuan dahulu dari pemerintah pusat. Ini disebabkan agar efisiensi dapat terjalin dengan baik dan masyarakat cepat mendapatkan *respons* dari pemerintah daerah.

Konsekuensi terbesar dari pembentukan otonomi daerah ini yaitu pemerintah daerah akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk memberikan pelayanan masyarakat serta terus memperbaiki segala fasilitas publik di dalamnya dengan baik. Maka dari itu, sebuah otonomi daerah harus didukung dengan kemampuan fiskal daerah yang baik juga agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Faktor yang dapat menumbuhkan kemampuan fiskal daerah ialah perluasan desentralisasi fiskal. Hadirnya desentralisasi fiskal ini membawa kewenangan pada daerah ketika menarik pajak dan retribusi dari PAD yang tersedia serta akan memperkuat sistem di dalamnya dengan baik. Kemandirian fiskal suatu daerah akan mampu menjadi indikator utama untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dan melihat kemampuan pembiayaan kegiatan pemerintah tanpa bantuan campur tangan dari luar, termasuk didalamnya bantuan pemerintah pusat.

Desentralisasi dan otonomi daerah merupakan dua konsep penting dalam ilmu pemerintahan yang membahas distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Keduanya bertujuan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Holzacker (2015) membahas dalam buku *Decentralization and Governance for Sustainable Society in Indonesia* bahwa desentralisasi dapat meningkatkan keberlanjutan pemerintahan melalui peningkatan partisipasi publik, tetapi juga menekankan bahwa desain desentralisasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal agar efektif. Berikut penjelasan mendalam mengenai masing-masing konsep dan teori yang mendasarinya:

1. Teori Desentralisasi

Desentralisasi adalah proses penyerahan sebagian kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, lembaga lokal, atau unit-unit pemerintah yang lebih rendah. Teori ini berakar pada gagasan bahwa kekuasaan tidak perlu terpusat, melainkan bisa disebarkan agar lebih dekat dengan rakyat. Bentuk-bentuk Desentralisasi:

- Desentralisasi Administratif: Pengalihan fungsi dan tanggungjawab administratif dari pusat ke pemda, tanpa memberi otonomi penuh dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan strategis tetap berada di tangan pusat.
- Desentralisasi Politik: Transfer kekuasaan politik dan hak pembuatan kebijakan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi politik memungkinkan daerah memiliki hak untuk menyusun undang-undang atau peraturan daerah.
- Desentralisasi Fiskal: Pengalihan sebagian kewenangan terkait pengelolaan keuangan dari pusat ke pemda. Daerah diberi kewenangannya mengelola sumber daya keuangan mereka sendiri, misalnya melalui pajak daerah atau retribusi.
- Desentralisasi Ekonomi: Memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur kegiatan ekonomi lokal, termasuk kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan investasi, industri, dan perdagangan.

Manfaat Desentralisasi:

- Peningkatan efisiensi: Keputusan dapat diambil lebih cepat karena lebih dekat dengan permasalahan di lapangan.
- Partisipasi masyarakat: Desentralisasi memungkinkan masyarakat lokal untuk lebih aktif dalam pengambilan keputusan politik dan pembangunan.
- Pemerintahan yang responsif: Pemda lebih dekat ke masyarakat bisa lebih memahami kebutuhan-spesifik daerahnya.

Teori Utama dalam Desentralisasi:

- Teori Efisiensi Fiskal (*Fiscal Federalism Theory*): Menjelaskan desentralisasi fiskal bisa memaksimalkan efisiensi alokasi sumber dayanya karena daerah yang berbeda memiliki preferensi yang berbeda dalam hal pengeluaran publik.
- Teori Demokratisasi dan Partisipasi: Menyatakan bahwa desentralisasi meningkatkan partisipasi warga dalam pemerintahan dan memperkuat demokrasi lokal.

2. Teori Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah konsep yang merujuk pada hak, wewenang, juga kewajibannya daerah guna mengurus rumah tangganya berdasar prinsip-prinsip hukum. Otonomi ini memungkinkan daerah untuk menjalankan pemerintahan tanpa terlalu banyak campur tangan dari pusat, dengan tetap berada dalam kerangka negara kesatuan. Ciri-ciri Otonomi Daerah:

- Kewenangan Lokal: Daerah memiliki hak untuk menentukan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal.
- Pengelolaan Sumber Daya: Daerah memiliki hak untuk mengelola SDA, SDM dan keuangan di wilayahnya.
- Aparatur Daerah: Pemda punya wewenangnya guna mengelola juga mengangkat pejabat lokal.

Jenis Otonomi Daerah:

- Otonomi Nyata: Otonomi yang diberikan kepada daerah untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan secara nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan kondisi daerah.
- Otonomi Formal: Pemberian kewenangan kepada daerah dalam batas-batas tertentu berdasar UU, dimana pusat tetap memiliki pengaruh kuat.

Manfaat Otonomi Daerah:

- Pemerintahan yang lebih partisipatif: Warga lokal dapat terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka.
- Inovasi dan fleksibilitas kebijakan: Daerah memiliki ruang lebih luas untuk mengembangkan kebijakan inovatif yang sesuai dengan kondisi lokal.
- Pemerataan pembangunan: Dengan otonomi, daerah-daerah dapat lebih fokus pada pembangunan lokal, sehingga kesenjangan antara daerah bisa diminimalisir.

Teori Utama dalam Otonomi Daerah:

- Teori *Good Governance*: Otonomi daerah mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, karena memungkinkan akuntabilitas dan transparansi di tingkat lokal.
- Teori Pembangunan Lokal: Otonomi daerah dapat mempercepat pembangunan karena kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik daerah.

Hubungan antara Desentralisasi dan Otonomi Daerah:

- Desentralisasi sebagai Landasan Otonomi Daerah: Desentralisasi merupakan dasar dari otonomi daerah. Tanpa desentralisasi, otonomi daerah tidak dapat berjalan karena kewenangan tetap berada di tangan pusat.
- Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai Wujud Desentralisasi: Otonomi daerah merupakan bentuk konkret dari desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberi kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi akan memberikan kerangka dasar bagi distribusi kewenangan dari pusat ke daerah, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, responsivitas, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, sedangkan dalam Otonomi daerah akan memberikan hak dan kewenangan bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, yang memungkinkan mereka menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Penerapan yang baik dari desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan pembangunan yang merata, memperkuat demokrasi lokal, serta mengurangi kesenjangan antar daerah.

2.1.3 Teori Pertumbuhan Solow-Swan (Neoklasik)

Penggunaan teori ini didasarkan pada pertumbuhan persediaan modal di dalamnya, kemajuan teknologi, serta peningkatan angkatan kerja yang akan mempengaruhi output pada barang dan jasa. Teori Solow-Swan akan melihat

berbagai mekanisme pasar di dalamnya yang mampu menciptakan keseimbangan sehingga pemerintah tidak banyak mencampuri dan mempengaruhi kondisi pasar. Pemerintah hanya dapat membantu dalam sektor kebijakan fiskal dan moneter. Pertumbuhan yang meningkat berasal dari peningkatan penawaran tenaga kerja, akumulasi modal (termasuk modal manusia), serta adanya kemajuan teknologi yang menjadi fungsi waktu dan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas di dalamnya.

Beberapa asumsi dasar teori Solow-Swan yaitu:

1) *Full Employment*

Pada kondisi ini, dapat diasumsikan perekonomian berada pada keadaan tertutup. Perusahaan mampu memproduksi barang dan jasa dengan penggunaan tenaga kerja dan modal di dalamnya serta tidak adanya intervensi pemerintah, sehingga untuk perhitungan pendapatan nasional akan dihitung berdasarkan pengeluaran agregat. Bagian investasi hanya menggunakan tabungan guna meningkatkan pendapatan nasional.

2) Populasi dan Teknologi (Faktor Eksogen)

Pada kondisi *Capital Output Ratio* (COR) yang bersifat dinamis maka dalam menghasilkan tingkat output tertentu perlunya kombinasi setara antar *capital* dengan *labor*. Koefisien teknik bersifat variabel maka rasio modal buruh akan menyesuaikan selama waktu berjalan kepada arah rasio keseimbangan. Teori ini pada akhirnya memperhatikan keseimbangan pada kondisi sempurna yang berasal dari rasio modal-buruh. Ketika penggunaan capital tinggi, maka tenaga kerja semakin rendah, begitupun sebaliknya. Selain itu fokus pada fungsi produksi dengan hadirnya teknologi pada faktor produksi seperti *capital* dan *labor* maka sesuai dengan fungsi model dibawah ini:

$$Y = f(K, L, T)$$

Keterangan:

Y = Pertumbuhan Ekonomi (output total (PDRB))

f = Fungsi pada input-input yang dapat menghasilkan output

K = Pertumbuhan Modal (*Capital*)

L = Pertumbuhan Penduduk (*Labor*)

T = Pertumbuhan Teknologi (*Technology*)

Pada akhirnya, model Solow-Swan dirancang untuk melihat pada pertumbuhan persediaan modal, angkatan kerja, dan kemajuan teknologi agar dapat berinteraksi dalam perekonomian. Pada jangka panjang tabungan akan sangat berpengaruh menjadi investasi serta dapat meningkatkan modal dan tingkat outputnya. Di saat kondisi yang seimbang, tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita ditentukan oleh kemajuan teknologi secara eksogen. Kondisi teknologi menyebabkan peningkatan secara bersama-sama dengan sempurna atau bisa disebut sebagai *balance growth*.

Hal ini berbeda dari teori Keynesian, yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes, terutama berfokus pada jangka pendek dan dinamika fluktuasi ekonomi (seperti resesi dan depresi) melalui permintaan agregat (*aggregate demand*). Teori ini terkenal karena perhatiannya pada peran kebijakan fiskal dan moneter dalam menstabilkan perekonomian. Adapun ciri utama dalam pengembangan teori Keynesian bahwa: (1) Permintaan agregat (*aggregate demand*): Keynes menekankan bahwa permintaan agregat adalah penentu utama dari output dan lapangan kerja dalam jangka pendek. (2) Peran pemerintah: Keynes percaya bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi ketidakstabilan ekonomi, terutama selama masa resesi. Pemerintah dapat merangsang permintaan agregat melalui pengeluaran fiskal. (3) Pasar tidak selalu mencapai keseimbangan alami: Berbeda dengan ekonomi klasik, Keynesianisme mengakui bahwa pasar tidak selalu mencapai tingkat output penuh lapangan kerja, dan sering ada “kelambanan harga” yang menyebabkan pengangguran. (4) Fokus pada sisi permintaan (*demand-side*): Keynesianisme berargumen bahwa fluktuasi jangka

pendek dalam ekonomi lebih terkait dengan perubahan dalam permintaan agregat daripada dengan faktor-faktor produksi.

Kedua teori ini mengakui pentingnya investasi. Dalam teori Solow-Swan, investasi berperan dalam meningkatkan stok modal, sedangkan dalam teori Keynesian, investasi merupakan komponen penting dari permintaan agregat. Selain itu kedua teori mengakui peran teknologi, tetapi dalam konteks yang berbeda. Solow-Swan melihat teknologi sebagai faktor utama dalam pertumbuhan jangka panjang, sementara Keynes tidak terlalu fokus pada teknologi, lebih kepada masalah jangka pendek. Dapat disimpulkan bahwa Teori Solow-Swan memberikan pandangan yang lebih struktural dan jangka panjang tentang bagaimana ekonomi tumbuh dan berkembang melalui modal, tenaga kerja, dan teknologi. Teori Keynesian berfokus pada dinamika jangka pendek, seperti resesi dan pengangguran, serta bagaimana kebijakan fiskal dan moneter dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kedua teori ini melengkapi satu sama lain, dengan Keynesian lebih relevan dalam memahami fluktuasi jangka pendek, sementara Solow-Swan lebih relevan dalam menganalisis pertumbuhan jangka panjang.

2.1.4 Kemandirian Fiskal Daerah

Kemampuan dari pemerintah daerah untuk membiayai segala bentuk pelayanan masyarakat, pembangunan, serta kegiatan pemerintahan yang mana bersumber dari pendapatan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau modal lainnya dibandingkan dengan pendapatan transfer seperti bantuan dari pemerintah pusat (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). Melalui derajat kemandirian sebuah daerah mampu menunjukkan kemampuan dalam membiayai semua kegiatannya dengan sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah pusat (Zukhri, 2020). Jika kemandirian suatu daerah meningkat maka ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan menurun, begitupun sebaliknya. Hal ini dapat didukung oleh masyarakat yang didalamnya berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan melalui otonomi daerah.

Terdapat cara dalam mengukur dan mengetahui pola hubungan serta tingkat kemandirian fiskal daerah menurut Departemen dalam negeri (Depdagri) Republik Indonesia melalui Keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri), antara lain: Jika kurang dari 25% maka suatu daerah berada pada kondisi belum mandiri (instruktif). Pada tingkat 25% - 50% daerah tersebut mulai menuju pada kemandirian (konsultif). Jika pada angka 50% - 75% suatu daerah berada pada kondisi sudah mandiri (partisipatif). Pada tingkat 75% – 100% daerah sudah sangat mandiri (delegatif) yang mana PAD lebih besar dibandingkan dana bantuan dari transfer pusat. Berikut ini rumus perhitungan nilai rasio kemandirian fiskal menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tahun 2020:

$$\text{Rasio Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 6. Klasifikasi Kemandirian Fiskal

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100	Delegatif

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri, 2022

2.1.5 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)

Besaran harga yang akan dibayarkan pada para pekerja dalam jasa yang telah dilakukannya termasuk didalamnya faktor produksi, tenaga kerja tersebut akan mendapatkan sebuah imbalan yaitu upah. Bentuk penyederhanaannya tenaga kerja akan dibayar atas jasanya ketika sudah memproduksi barang dan/atau jasa. Upah minimum menjadi dasar dalam penentuan upah yang diterapkan bagi pengusaha dan sektor industri. Upah minimum menjadi upah bulanan terendah yang sudah ditetapkan melalui Gubernur di daerah nya masing-masing (PerMenKet RI No.18 Tahun 2022, Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023). Pemberlakuan upah dilakukan pada seorang pekerja yang memiliki pengalaman bekerja selama

0-1 tahun berdasarkan rekomendasi dewan pengupahan selama 1 tahun berjalan. Standar pembentukan upah minimum ini menjadi pondasi dalam menjalankan sebuah produk barang dan/atau jasa bagi para pekerja.

Sukirno, (2013) menjelaskan bahwa upah sebagai pembayaran yang diberikan atas jasa fisik maupun mental bagi pada tenaga kerja buruh melalui masa atau syarat tertentu oleh pengusaha. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No.6 Tahun 2023 upah adalah hak dari para pekerja yang akan diterima dalam bentuk uang sebagai sebuah imbalan yang diberikan sesuai dengan kontrak kerja yang berlaku, serta berdasarkan perundang-undangan termasuk didalamnya sebuah tunjangan dan jaminan pada keluarga pekerja.

Adapun formula dalam menghitungnya yaitu dengan mempertimbangkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu. Berikut ini formula perhitungan upah minimum berdasarkan UU Cipta Kerja:

$$UM_{(t+1)} = UM_{(t)} + (UM_{(t)} \times (\text{Inflasi} + \text{Pertumbuhan PDB}))$$

Keterangan:

$UM_{(t+1)}$ = Upah Minimum untuk tahun berikutnya

$UM_{(t)}$ = Upah Minimum tahun berjalan.

Inflasi = Persentase kenaikan harga barang-jasa tahun sebelumnya

Pertumbuhan PDB = Pertumbuhannya ekonomi dari tahun sebelumnya.

Jika sebuah Kabupaten/Kota masih belum mempunyai besaran upah minimum, maka dapat dilakukan melalui perhitungan nilai *relative* UMK terhadap UMP berdasarkan formula rasio paritas daya beli yaitu:

$$UMK_{(F1)} = \frac{PPP \text{ Kab/Kota}}{PPP \text{ Provinsi}} \times UMP_{(t)}$$

Keterangan:

$UMK_{(F1)}$ = Nilai Upah Minimum kab/kota melalui pertimbangan faktor paritas daya belinya (PPP).

PPP Kab/Kota	= Rerata PPP 3 (tiga) tahun terakhir pada kab/kota.
PPP Provinsi	= Rerata PPP 3 (tiga) tahun terakhir pada provinsi.
UMP _(t)	= Upah Minimum Provinsi tahun berjalan.

2.1.6 Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal adalah sebuah anggaran yang dapat digunakan guna memperoleh asset tetap maupun asset lainnya. Hal-hal yang termasuk ke dalam belanja modal antara lain: gedung, bangunan, peralatan, asset tak terwujud, maupun pemerolehan tanah. Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS), menjelaskan bahwa belanja modal menjadi sebuah pengeluaran yang dapat memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi selain itu dapat melebihi batas minimal kapasitas asset tetap atau asset lainnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sugiarto (2016) menjelaskan bahwa di dalam belanja modal manfaatnya cenderung akan melebihi dari satu tahun anggaran dan menambahkan asset atau kekayaan pemerintah. Perhitungan belanja modal dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Secara teoritis terdapat tiga cara untuk memperoleh asset tetap, yaitu dengan cara menukar dengan asset tetap lain, membangun sendiri, atau dengan cara membeli (Haksanggulawan et al., 2023). Asset tersebut dipergunakan untuk kegiatan operasional sehari-hari suatu satuan kerja dan bukan untuk diperjual belikan. Menurut Malau & Sumaizar (2023) indikator belanja modal dapat diukur dengan: Belanja Modal = Belanja tanah + belanja peralatan dan mesin + belanja gedung dan bangunan + belanja jalan, irigasi dan jaringan + belanja asset lainnya.

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia

Sebagai salah satu cara dalam mengukur tingkat kemajuan sebuah Negara/wilayah dapat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *United Nations Development Programme* (UNDP) menjelaskan secara merinci bagaimana manusia berproses untuk menentukan pilihan di masa depan melalui umur yang

panjang dan sehat, berakal pintar, serta mempunyai akses besar dalam mengolah sumber daya supaya dapat hidup layak. Maka, fokus utama dalam pembangunan suatu Negara ialah faktor manusia. Namun, hal-hal tersebut sulit untuk dicapai jika didalam suatu Negara masih terjadi konflik kepentingan serta masih belum terjadinya keseimbangan tujuan. Faktor ekonomi yang menjadi faktor terpenting akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia, masih banyaknya pengangguran, upah yang rendah, serta inflasi menjadikan IPM semakin sulit untuk diraih jika tidak adanya upaya keras dari pemerintah maupun dari masyarakat.

Indeks pembangunan manusia selaras dengan tujuan bangsa Indonesia yang mana tercantum dalam UUD 1945 dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini bermakna sumber daya manusia harus diprioritaskan guna mendapatkan kehidupan yang layak. Dimensi yang terkandung dalam IPM memiliki 3 unsur mendasar di dalamnya, antara lain: hidup sehat serta umur panjang menggunakan angka harapan hidup saat lahir, pengetahuan dihitung dengan angka harapan sekolah serta rata-rata lama sekolah, dan standar kehidupan yang layak dihitung melalui PDB/PDRB (kemampuan belanja) per kapita. BPS (2024) memformulasikan IPM sebagai berikut:

$$\text{IPM} = 1/3 (\text{Indeks X1} + \text{Indeks X2} + \text{Indeks X3})$$

Keterangan :

X1 = Indeks harapan hidup

X2 = Tingkat pendidikan

X3 = Standar hidup layak, indikatornya kemampuan daya beli.

Komponen yang terkandung didalamnya juga memiliki perhitungan masing-masing, standar yang ditentukan dalam melihat nilai minimum serta maksimum yakni:

Dimensi Kesehatan

$$I = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Keterangan:

I = Indeks angka harapan hidup

AHH = Angka harapan hidup

AHH_{min} = AHH paling rendah

AHH_{max} = AHH paling tinggi

Dimensi pendidikan

$$I = \frac{IHLS + IHRS}{2}$$

Keterangan:

I = Indeks komponen

HLS = Harapan lama sekolah

RLS = Rata-rata lama sekolah

Dimensi Pengeluaran (Ekonomi)

$$I = \frac{P - P_{min}}{P_{max} - P_{min}}$$

Keterangan:

I = Indeks pengeluaran

P = Angka pengeluaran

P_{min} = P paling rendah

P_{max} = P paling tinggi

2.1.8 Teori Pertumbuhan Ekonomi

BPS (2021) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan pada produk barang dan jasa di suatu Negara pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya dihitung melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan. Terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal, populasi dan pertumbuhan angkatan kerja, serta ilmu pengetahuan (Todaro & Smith, 2006). Investasi yang tinggi mampu berdampak pada kualitas produk, penambahan jumlah penduduk dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja, dan canggihnya teknologi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Alif & Hazmi, 2024). Salah satu pendekatan perhitungan pendapatan nasional adalah pendekatan pengeluaran maka persamaannya sebagai berikut (Mankiw, 2020):

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y = PDB, C = konsumsi, I = investasi, G = pengeluaran pemerintah, X = ekspor, M = impor.

Melalui PDB, pertumbuhan ekonomi dihitungnya sesuai formula berikut ini (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2018):

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi (PE)} = \frac{\text{PDBt} - \text{PDBt-1}}{\text{PDBt-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

PE = Pertumbuhan Ekonomi (%)

PDBt = PDB Riil pada Tahun t

PDBt-1 = PDB Riil pada 1 Tahun sebelum Tahun t.

PDB riil merupakan hasil nilai tambah dari keseluruhan unit usaha dalam suatu Negara untuk meningkatkan nilai tambah menggunakan harga barang berlaku pada tahun yang dipilih sebagai tahun dasar (BPS, 2021). Adapun nilai PDB riil dapat dihitung dengan formula sebagai berikut (Mankiw, 2016):

$$\text{PDB Riil} = \frac{\text{PDB Nominal}t}{\text{PDB Deflator}t}$$

Keterangan:

PDB Nominalt = PDB atas harga berlaku pada tahun t

Deflator PDBt = Rasio harga saat ini dengan harga dasar tahun t

2.2 Tinjauan Empiris

Analisis hasil dari penelitian sebelumnya akan digunakan sebagai bahan referensi dan sebagai perbandingan dalam penelitian ini, yang memiliki keterkaitan dengan variabel independent/bebas berupa kemandirian fiskal daerah, upah minimum kabupaten/kota, belanja modal dan indeks pembangunan manusia, serta variabel dependent/terikat yaitu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. Penelitian Terdahulu

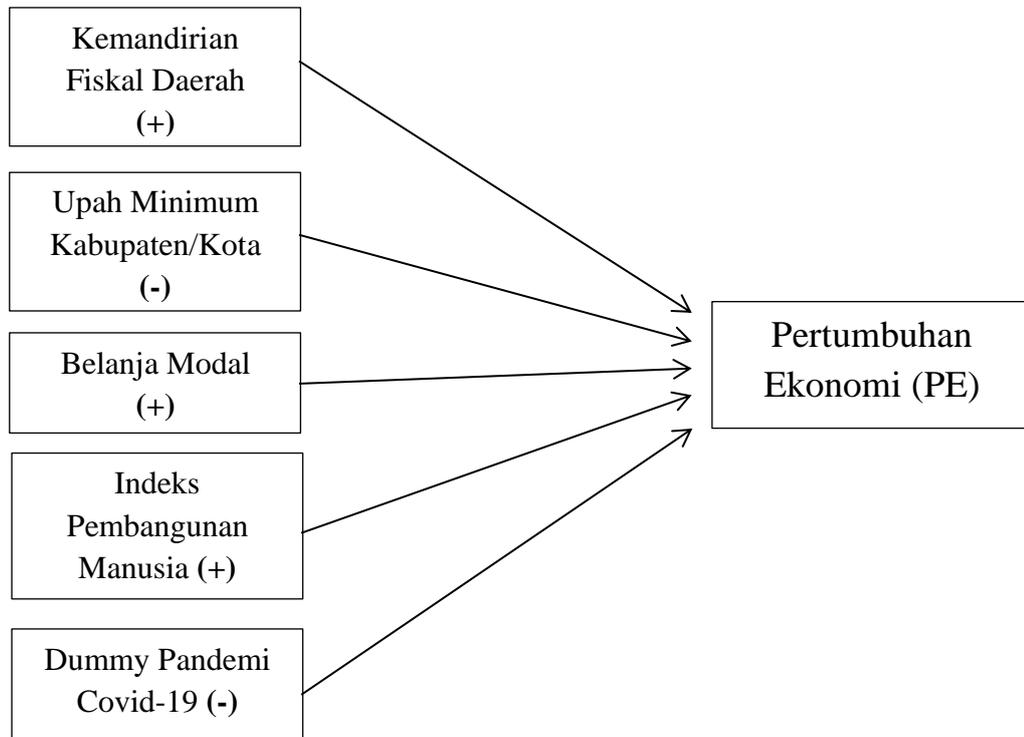
No	Penelitian	Variabel/Metode	Hasil
1	(Maryanti et al., 2023). “Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau”.	Independent/Bebas: X1 = Kemandirian Keuangan Daerah X2 = Kemampuan Keuangan Daerah Dependent/Terikat: Y = Pertumbuhan Ekonomi Metode = Regresi linear berganda.	Secara parsial kemandirian keuangan daerah tiada pengaruhnya terhadap pertumbuhannya ekonomi, sementara kemampuan keuangan berpengaruhnya ada ke pertumbuhannya ekonomi. Secara simultan kedua variabel bebas tersebut tiada pengaruhnya ke pertumbuhannya ekonomi di Riau 2017-2022.
2	(Irasriadipura et al., 2023). “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhan ekonomi Dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel <i>Intervening</i> (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-2019)”.	Independent/Bebas: X1 = Desentralisasi Fiskal X2 = Kemandirian Keuangan Daerah X3 = Efektifitas dan Efisiensi Dependent/Terikat: Y = Pertumbuhan Ekonomi Metode = Regresi linear berganda	Desentralisasinya fiskal, kemandiriannya fiskal juga efektivitas ada berpengaruhnya ke pertumbuhan ekonominya Kab/Kota di Jambi (2016-2019).
3	(Afif & Ciptawaty, 2020). “Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Lampung Tahun Anggaran 2014-2018”.	Independent/Bebas: X1 = Kemandirian Keuangan Daerah Dependent/Terikat: Y = Pertumbuhan Ekonomi Metode = Regresi linear berganda	Kemandirian keuangan daerah tiada pengaruh signifikannya terhadap pertumbuhan ekonominya Kab/Kota di Lampung (2014-2018).
4	(Bayu Windayana & Darsana, 2020). “Pengaruh Tingkat Pendidikan, UMK,	Independent/Bebas: X1 = Tingkat Pendidikan X2 = Upah	Tingkat pendidikan berpengaruhnya positif ke pertumbuhannya ekonomi, UMK berpengaruhnya

No	Penelitian	Variabel/Metode	Hasil
	Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2018”.	Minimum Kabupaten/Kota X3 = Investasi Dependent/Terikat: Y = Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi Metode = Regresi linier berganda	negative, investasi tiada pengaruhnya, penyerapan tenaga kerja berpengaruh langsung ke pertumbuhan ekonominya Kab/Kota di Bali.
5	(Pratiwi, 2023). “Peranan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Bali 2018-2022”.	Independent/Bebas: X1 = Upah Minimum Dependent/Terikat: Y = Pertumbuhan Ekonomi Metode = Regresi linier berganda	Upah minimum berpengaruh positif-signifikan pada pertumbuhan ekonominya Bali (2018-2022).
6	(Gosal et al., 2022). “Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado Tahun 2005-2021”.	Independent/Bebas: X1 = Belanja Modal X2 = Belanja Barang dan Jasa Dependent/Terikat: Y = Pertumbuhan Ekonomi Metode = Regresi Linear Berganda	Belanja modal berpengaruh positif signifikan, sedangkan belanja barang berpengaruh secara negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.
7	(Maury et al., 2023). “Pengaruh Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara”.	Independent/Bebas: X1 = Belanja Modal X2 = Tenaga Kerja Dependent/Terikat: Y = Pertumbuhan Ekonomi Metode = Analisis Regresi linear Berganda	Belanja modal berpengaruh positif-tak signifikan ke pertumbuhannya ekonomi, sementara tenaga kerja berpengaruh positif-signifikan di Minahasa Tenggara.
8	(Maramis, 2023). “Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara”.	Independent/Bebas: X1 = Belanja Modal X2 = Investasi Swasta Dependent/Terikat: Y = Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Metode = Analisis Regresi linear Berganda	Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan investasi swasta tiada pengaruhnya signifikan ke pertumbuhan ekonominya Sulawesi Utara.

No	Penelitian	Variabel/Metode	Hasil
9	(Arifin & Fadllan, 2021). “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018”.	Independent/Bebas: X1 = Indeks Pembangunan Manusia X2 = Tingkat Pengangguran Dependent/Terikat: Y = Pertumbuhan Ekonomi Metode = Regresi linear Berganda	IPM pengaruhnya positif-signifikan sementara pengangguran pengaruhnya negatif-tak signifikan pada pertumbuhan ekonominya Jawa Timur (2016-2018).
10	(Isnaini et al., 2023). “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Tenaga Kerja, Rasio Ketergantungan dan Rasio Jenis Kelamin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah Tahun 2015-2021”.	Independent/Bebas: X1 = Indeks Pembangunan Manusia X2 = Jumlah Tenaga Kerja X3 = Rasio Ketergantungan X4 = Rasio Jenis Kelamin Dependent/Terikat: Y = Pertumbuhan Ekonomi Metode = <i>Fixed Effect Model (FEM) panel data regression</i>	IPM, tenaga kerja dan jenis kelamin berpengaruh positif, sementara rasio ketergantungan berpengaruh negatif ke pertumbuhan ekonominya Jawa Tengah (2015-2021).

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasar pedoman teori dimana sudah dijabarkan, maka didapatkan konsep yang dijadikan acuan di dalam penelitian ini. Sehingga peneliti menjelaskan dengan mengaplikasikan masalah penelitian dalam bentuk bagan kerangka pemikiran.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- X1 = Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD)
- X2 = Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
- X3 = Belanja Modal (BM)
- X4 = Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
- X5 = Dummy Pandemi Covid-19 (DPC)
- Y = Pertumbuhan Ekonomi (PE)

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang mendasari dan juga kerangka berpikir yang telah dibuat sebelumnya, maka dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Diduga bahwa Kemandirian Fiskal Daerah memiliki hubungan positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung secara parsial.
2. Diduga bahwa Upah Minimum Kabupaten/Kota memiliki hubungan negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung secara parsial.
3. Diduga bahwa Belanja Modal memiliki hubungan positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung secara parsial.
4. Diduga bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung secara parsial.
5. Diduga bahwa Pandemi Covid-19 memiliki perubahan negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung secara parsial.
6. Diduga bahwa Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Belanja Modal (BM), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung secara simultan.
7. Diduga bahwa Kemandirian Fiskal Daerah, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia, mampu menjelaskan variasi nilai-nilai pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Penggunaan metode deskriptif akan lebih mudah dalam menginterpretasikan, menganalisis, serta mengklasifikasikan sebuah objek penelitian sehingga akan cepat menemukan informasi yang terdapat didalamnya sesuai topik pilihan. Kuantitatif sendiri menjadi acuan dengan menganalisis data berupa data numerik. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada. Penelitian ini menganalisis tentang pengaruh Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Belanja Modal (BM), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai variabel independen/bebas terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) sebagai variabel dependen/terikat 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung selama 2018-2022, serta menambahkan variabel dummy pandemi covid-19 di dalamnya. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen atau *database* pada laman instansi terkait yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bank Indonesia (BI), serta buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah lainnya.

Tabel 8. Data dan Sumber Data

Variabel	Periode	Satuan	Sumber Data
Kemandirian Fiskal Daerah	2018-2022	Persen	DJPK
Upah Minimum Kab/Kota	2018-2022	Juta Rp	BPS
Belanja Modal	2018-2022	Persen	DJPK
Indeks Pembangunan Manusia	2018-2022	Persen	BPS
Pertumbuhan Ekonomi	2018-2022	Persen	BPS

3.2 Definisi Operasional Variabel

Tujuan dari dibentuknya pendefinisian masing-masing variabel yaitu untuk mempertajam, meningkatkan kemampuan dalam memahami konteks variabel, serta memperjelas dari tulisan. Adapun variabel dari penelitian ini yaitu kemandirian fiskal daerah, upah minimum kabupaten/kota, belanja modal, dan indeks pembangunan manusia sebagai *dependent variable*/variabel bebas serta pertumbuhan ekonomi sebagai *independent variable*/variabel terikat. Berikut merupakan definisi dari masing-masing variabel:

1) Kemandirian Fiskal Daerah (X1)

Kemampuan dari pemerintah daerah untuk membiayai segala bentuk pelayanan masyarakat, pembangunan, serta kegiatan pemerintahan yang mana bersumber dari pendapatan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan transfer seperti bantuan dari pemerintah pusat (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020). Formulasi perhitungan menurut BPK sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

2) Upah Minimum Kabupaten/Kota (X2)

Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja No.6 tahun 2023 tentang upah minimum, dijelaskan bahwa Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota masing-masing tergantung pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaannya. Adapun pengertian upah minimum sendiri yaitu upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Data dalam variabel ini diambil melalui Badan Pusat Statistik selama 5 tahun berjalan (2018-2022).

3) Belanja Modal (X3)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal adalah sebuah anggaran yang dapat digunakan guna memperoleh asset tetap maupun asset lainnya yang dapat memberikan

manfaat pada satu periode akuntansi. Data dalam variabel ini diambil melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selama 5 tahun berjalan (2018-2022).

4) Indeks Pembangunan Manusia (X4)

Sebagai salah satu cara dalam mengukur tingkat kemajuan sebuah negara/wilayah dapat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (BPS, 2024). Data dalam variabel ini diambil melalui Badan Pusat Statistik selama 5 tahun berjalan (2018-2022).

5) Pertumbuhan Ekonomi (Y)

BPS (2021) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan pada produk barang dan jasa di suatu negara pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya dihitung melalui Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan. Data dalam variabel ini diambil melalui Badan Pusat Statistik selama 5 tahun berjalan (2018-2022).

6) Dummy Pandemi Covid-19 (DPC)

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah wabah penyakit yang muncul pada tahun 2020 di Kota Wuhan, China. Hal ini berdampak ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan akibat Covid-19 yang melanda. Variabel dummy pandemi covid-19 adalah variabel biner (0 atau 1) yang digunakan dalam model regresi untuk menangkap dampak khusus dari pandemi Covid-19 pada variabel yang akan diteliti. Variabel dummy ini digunakan untuk menguji apakah pandemi memiliki pengaruh signifikan terhadap hubungan antara variabel independen dan dependen dalam suatu model. Adapun penggunaan variabel biner covid-19 sebagai berikut:

0 = Sebelum pandemi Covid-19 (2018-2019)

1 = Selama pandemi Covid-19 (2020-2022)

3.3 Metode Analisis dan Model Regresi

Metode penggunaan regresi data panel menjadi pilihan dalam menentukan tingkat tinggi atau rendahnya sebuah hasil perhitungan. Alat analisis yang digunakan yaitu software EViews 10 dengan bantuan dari Ms. Excel. Model regresi menggunakan data panel akan menentukan pilihan yang terbaik antara *common effect*, *fixed effect*, atau *random effect*. Adapun bentuk regresi data panel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 KEMFD_{it} + \beta_2 UMK_{it} + \beta_3 BM_{it} + \beta_4 IPM_{it} + \beta_5 DPC_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

PE	= Pertumbuhan Ekonomi (%)
β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien Regresi Variabel Independen
KEMFD	= Kemandirian Fiskal Daerah (%)
UMK	= Upah Minimum Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)
BM	= Belanja Modal (%)
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia (%)
DPC	= Dummy Pandemi Covid-19 (0 = sebelum covid-19, 1 = selama Covid-19)
ε	= <i>Error term</i> (Galat)
i	= 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung
t	= 5 Tahun (2018-2022)

Estimasi Regresi Data Panel

3.3.1.1 *Common Effect Model*

Common Effect Model (CEM) adalah bentuk estimasi penggabungan data *time series* dengan *cross section*. Penggunaan pendekatan ini tidak melihat dimensi individunya maupun sisi waktu sehingga metode OLS digunakan dalam mengestimasi model. Hal ini dapat diasumsikan bawah data yang ditampilkan sama dalam kurun waktu (Widarjono, 2018).

- *Common Effect Model* (CEM) mengasumsikan bahwa semua individu dalam dataset memiliki struktur yang sama, sehingga tidak ada efek individual atau efek waktu. Model ini memperlakukan semua unit (seperti perusahaan, daerah, negara) secara homogen.
- Dalam CEM, tidak memperhitungkan perbedaan antar unit atau waktu. Ini seperti model regresi OLS standar.

Bentuk Persamaan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel dependennya individu i pada waktu t .

X_{it} = Variabel independennya individu i pada waktu t .

β_0 = Intersep

β_1 = Koefisien regresinya variabel independen.

ϵ_{it} = *Error term* atau residual untuk individu i pada waktu t .

Interpretasi: Model ini mengasumsikan bahwa hubungannya variabel independen dan dependennya sama pada semua individu dan periode waktu.

3.3.1.2 Fixed Effect Model

Fixed Effect Model (FEM) dapat diasumsikan ketika *slope* akan tetap antar ruang dan waktu. Estimasi ini dapat juga menggunakan *dummy* guna memperjelas pada perbedaan intersep variabel. Model estimasi ini dapat disebut sebagai *Least Squares Dummy Variable* (Widarjono, 2018).

- *Fixed Effect Model* (FEM) mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan antar individu yang konstan dan unik, tetapi efek ini tidak berubah seiring waktu (efek waktu tidak dipertimbangkan). Dengan kata lain, FEM mengontrol perbedaan antar individu tetapi tidak untuk variasi waktu.
- Efek individual ditangkap melalui intersep berbeda tiap unitnya, tetapi *slope* (kemiringan) regresi tetap sama untuk semua unit.

Bentuk Persamaan:

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel dependennya individu i pada waktu t .

α_i = Intersep atau efek tetap (*fixed effect*) spesifik untuk individu i .

X_{it} = Variabel independen untuk individu i pada waktu t .

β_1 = Koefisien regresi untuk variabel independen.

ϵ_{it} = *Error term* atau residual untuk individu i pada waktu t .

Interpretasi:

- α_i mewakili efek spesifik untuk setiap individu yang tidak bisa dijelaskan oleh variabel independen.
- Variasi antar individu ditangkap oleh perubahan dalam intersep, tetapi koefisien variabel independen (β_1) tetap sama untuk semua individu.
- Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu adalah tetap dan penting untuk diperhitungkan.

3.3.1.3 Random Effect Model

Random Effect Model (REM) adalah bentuk regresi dengan asumsi slope konstan serta intersep berbeda antar individu dan waktu (*random effect*). Penggunaan variabel *dummy* pada FEM akan melihat ketidaktahuan pada model sebenarnya. Maka konsekuensi pada pemilihan model akan mengurangi derajat kebebasan yang mana mengurangi efisiensi parameter. REM akan mampu menyelesaikan masalah ini menggunakan variabel gangguan didalamnya. Model yang tepat digunakan untuk mengestimasi random effect adalah Generalized Least Square (GLS) sebagai estimatornya karena dapat meningkatkan efisiensi dan least square (Widarjono, 2018).

- *Random Effect Model* (REM) mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu adalah acak dan tidak tetap, serta bahwa perbedaan ini berasal dari distribusi tertentu. Dalam REM, efek individual dianggap sebagai

komponen acak, yang memungkinkan variasi antar individu dan antar waktu secara acak.

- Tidak seperti FEM yang memperlakukan efek individual sebagai konstanta, REM menganggap bahwa efek individual merupakan bagian dari *error term*.

Bentuk Persamaan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_i + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Variabel dependennya individu i pada waktu t .

β_0 = Intersep (konstanta).

X_{it} = Variabel independennya individu i pada waktu t .

μ_i = *Random effect* (efek acak) untuk individu i , yang dianggap sebagai bagian dari *error term* dan berdistribusi normal.

β_1 = Koefisien regresi untuk variabel independen.

ϵ_{it} = *Error term* spesifik untuk individu i pada waktu t .

Interpretasi:

- μ_i adalah efek individual yang bersifat acak dan tidak tetap. Ini mencerminkan variasi acak yang dimiliki oleh setiap individu.
- Model ini memungkinkan variasi antar individu dan antar waktu dengan mengasumsikan bahwa perbedaan individual berasal dari proses acak yang mengikuti distribusi tertentu.
- REM lebih tepat digunakan jika efek individual tidak berhubungan dengan variabel independen, sehingga efek acak dianggap sebagai bagian dari kesalahan.

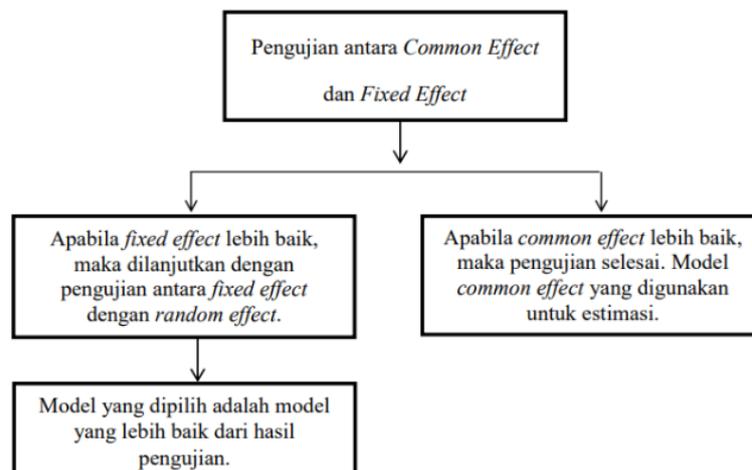
Tabel 9. Ringkasan Perbedaan Bentuk Model

Model	Bentuk Persamaan	Karakteristik Utama
<i>Common Effect Model</i> (CEM)	$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it}$	Mengasumsikan struktur yang sama untuk semua individu dan waktu (tidak ada efek individual atau waktu).
<i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{it} + \epsilon_{it}$	Menangkap perbedaan individual tetap (konstan) antar unit, intersep berbeda untuk setiap individu.
<i>Random Effect Model</i> (REM)	$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \mu_i + \epsilon_{it}$	Menganggap perbedaan antar individu sebagai efek acak, intersep sama, efek individual dianggap sebagai bagian dari <i>error term</i> .

- *Common Effect Model* (CEM) adalah model dasar yang mengabaikan perbedaan antar individu dan waktu.
- *Fixed Effect Model* (FEM) digunakan ketika perbedaan antar individu dianggap signifikan dan konstan, menangkap perbedaan antar unit dengan intersep yang berbeda untuk setiap unit.
- *Random Effect Model* (REM) digunakan ketika perbedaan antar individu dianggap acak, dengan efek individual dianggap sebagai komponen acak dalam *error term*.

3.3.2 Uji Kesesuaian Model

Beberapa langkah dalam menguji kesesuaian model yang tepat untuk digunakan dalam merumuskan perhitungan regresi dapat melalui beberapa tahap antara lain: Uji F = signifikansi *fixed effect*, Uji LM = signifikansi *random effect* dan Uji Hausman = signifikansi *fixed effect* dan *random effect* (Sriyana, 2014).

**Gambar 4.** Prosedur Pengujian Pemilihan Model

3.3.2.1 Uji Chow

Uji Chow atau bisa disebut sebagai pengujian F-Statistik adalah cara untuk menentukan model mana yang baik digunakan antara *common effect model* dengan *fixed effect model*. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan pengujian *fixed effect* guna melihat apakah model dengan asumsi didalamnya *slope* serta intersep tetap anatar individu maupun antar waktu maka yang terpilih CEM, jika perlu menambahkan *dummy variable* untuk melihat perbedaan pada intersep maka yang terbaik adalah FEM. Uji statistik F akan lebih mudah dilakukan guna menentukan model terbaik. Cara nya dengan melihat pada nilai *Residual Sum of Squares* (RSS) dari model-model yang disajikan (CEM/FEM). Melihat perbandingan pada hipotesis nol (H_0) bahwa *slope* dan *intersept* tetap (FEM) akan melihat hipotesis alternatif pada (H_a) bahwa *slope* tetap sedangkan intersep berubah-ubah (FEM) (Sriyana, 2014).

3.3.2.2 Uji Hausman

Setelah menguji menggunakan Chow, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah model terbaik FEM atau REM bisa menggunakan Uji Hausman. Ketika menggunakan FEM maka suatu unsur tersebut terdapat *trade-off* (hilang derajat bebas pada *dummy variable*), namun jika menggunakan REM harus tetap memperhatikan pelanggaran asumsi pada komponen galat. Adapun hipotesa dalam Uji Hausman antara lain:

- H_0 : *Random Effect Model*
- H_a : *Fixed Effect Model*

Penggunaan Uji Hausman akan menuntun pada statistik *Chi Square* menggunakan *degree of freedom* sebanyak k (jumlah variabel independen). Jika H_0 ditolak yaitu nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, model FEM adalah model yang paling terbaik, namun jika H_0 diterima maka REM adalah model yang terbaik untuk dipilih.

3.3.2.3 Uji Lagrange Multiplier

Pengujian Lagrange Multiplier (LM) merupakan langkah signifikansi REM untuk melihat perbandingan pada REM dengan model OLS pada CEM. Dilakukan jika

model REM yang terpilih serta dapat ditentukan pada H_0 yang digunakan varian cross section bernilai nol. Nilai LM dapat dihitung menggunakan X^2 tabel dengan *degree of freedom* sejumlah variabel independen nya. Apabila nilai LM lebih besar dari X^2 tabel, maka H_0 ditolak (REM lebih baik digunakan). Jika pemilihan model yang dipilih pada Uji Hausman adalah FEM maka tidak diperlukan pengujian LM lagi (Sriyana, 2014).

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan suatu uji yang digunakan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang di dapatkan memiliki ketetapan dalam estimasi, konsisten serta tidak bias. Uji asumsi klasik ini meliputi:

3.4.1.1 Uji Normalitas Residual

Uji ini dilakukan guna mengetahui apakah pada model regresi dalam penelitian, residual memiliki distribusi normal atau tidak. Dimana model regresi yang baik berarti berdistribusi normal. Untuk mengetahui suatu model memiliki distribusi normal atau tidak maka dapat digunakan dengan cara metode Jarque-Bera, dimana:

- H_0 : Data residual berdistribusi normal
- H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila probabilitas bernilai $\geq 0,05$ maka ini terima H_0 . Yang berarti data residual berdistribusi normal.

Apabila probabilitas bernilai $< 0,05$ maka ini tolak H_0 . Dengan demikian data residual tidak berdistribusi normal.

3.4.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat apakah variabel gangguan mempunyai varian yang tidak konstan atau tidak. Metode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah heteroskedastisitas dalam model regresi ialah menggunakan uji Glejser. Uji Glejser ialah uji untuk meregresikan nilai

absolute residual dengan variabel independennya. Dasar pengambilan keputusan pengujian heteroskedastisitas dalam model regresi ialah sebagai berikut:

- Jika nilai *probability* $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya bahwa model regresi tersebut terdapat masalah heteroskedastisitas.
- Jika nilai *probability* $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya bahwa model regresi tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas

3.4.1.3 Uji Multikolinieritas

Pendeteksian digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terdapat hubungan yang sempurna antar variabel independen atau tidak. Jika dalam model regresi ternyata ditemukan multikolinieritas sempurna, maka model ini tidak dapat diestimasi. Dengan demikian, model regresi yang baik merupakan model yang tidak memiliki multikolinieritas antar variabel independennya. Deteksi multikolinieritas digunakan untuk melihat hubungan linear antara variabel independen di dalam regresi. Widarjono (2018) menjelaskan *rule of thumb* di dalam pendeteksian multikolinieritas menggunakan korelasi parsial antarvariabel independen dengan hipotesis jika koefisien korelasi cukup tinggi ($>0,85$) maka terdapat masalah multikolinieritas dalam model, namun jika korelasi relatif rendah maka dugaan model tidak mengandung unsur multikolinieritas. Model regresi yang baik, ditandai dengan tidak adanya korelasi antar variabel bebas, jika antar variabel bebas terjadi korelasi, maka model regresi tersebut mempunyai masalah multikolinieritas.

Dasar pengambilan keputusan terjadi atau tidaknya masalah multikolinieritas ialah sebagai berikut:

- Jika nilai korelasi $> 0,85$ maka H_0 ditolak , artinya model regresi tersebut terdapat masalah multikolinieritas.
- Jika nilai korelasi $< 0,85$ maka H_0 diterima, artinya model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinieritas.

3.5 Pengujian Hipotesis

3.5.1 Uji Pengaruh Parsial (Uji-t)

Uji ini digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial memiliki pengaruh atau tidak terhadap variabel dependen. Taraf nyata yang digunakan dalam uji-t adalah sebesar 0,05 dan menggunakan uji satu arah, dengan asumsi sebagai berikut:

a) Kemandirian Fiskal Daerah

- $H_0 : \beta_1 \leq 0$, Kemandirian Fiskal Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- $H_a : \beta_1 > 0$, Kemandirian Fiskal Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

b) Upah Minimum Kabupaten/Kota

- $H_0 : \beta_2 \geq 0$, Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- $H_a : \beta_2 < 0$, Upah Minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

c) Belanja Modal

- $H_0 : \beta_3 \leq 0$, Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- $H_a : \beta_3 > 0$, Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

d) Indeks Pembangunan Manusia

- $H_0 : \beta_4 \leq 0$, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- $H_a : \beta_4 > 0$, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

e) Dummy Pandemi Covid-19 terhadap Pertumbuhan Ekonomi

- $H_0 : \beta_5 \geq 0$, Dummy Pandemi Covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- $H_a : \beta_5 < 0$, Dummy Pandemi Covid-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

Keputusan untuk menolak atau gagal menolak H_0 ialah sebagai berikut:

- a) Jika $t_0 < t_a$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b) Jika $t_0 > t_a$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.2 Uji Pengaruh Serempak (Uji-F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model regresi berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pada penelitian ini, Uji-F dilakukan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 5%. Berikut hipotesis untuk uji-F.

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$. Hal ini berarti secara serempak variabel Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Belanja Modal (BM), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Variabel Dummy Pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

H_a : Salah satu dari $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5 \neq 0$. Hal ini berarti paling tidak salah satu dari Kemandirian Fiskal Daerah (KEMFD), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Belanja Modal (BM), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Variabel Dummy Pandemi Covid-19 memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Kriteria pengambilan keputusannya yakni:

- Terima H_0 apabila $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$ atau signifikan $F \geq \alpha (0,05)$
- Tolak H_0 apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ atau signifikan $F < \alpha (0,05)$

3.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 dan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin nilai R^2 mendekati angka 1, maka semakin baik garis regresinya karena mampu menjelaskan data aktualnya, begitu sebaliknya (Widarjono, 2018).

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pengujian yang dilakukan secara bertahap dan penentuan model penelitian menjadi kunci utama dalam mendapatkan hasil dari penelitian. Didapatkan uji terbaik dalam penggunaan modal regresi menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan melalui pengujian Uji Chow. Pada tahap akhir penelitian melihat pengaruh variabel menggunakan uji t (uji secara parsial), uji f (uji secara simultan) dan pengujian Koefisien Determinasi (R^2). Hasilnya sebagai berikut:

1. Kemandirian Fiskal Daerah secara parsial memiliki hubungan yang signifikan ditandai dengan nilai probabilitas sebesar $0.0078 < 0.05$. Nilai koefisien regresi kemandirian fiskal daerah berada pada angka 0.805180 yang artinya setiap meningkatnya kemandirian sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.80% pada 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.
2. Upah minimum kabupaten/kota secara parsial memiliki hubungan yang signifikan ditandai dengan nilai probabilitas sebesar $0.0004 < 0.05$. Nilai koefisien regresi upah minimum berada pada angka -1.178543 yang artinya setiap meningkatnya upah sebesar 1% maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.17% pada 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.
3. Belanja Modal secara parsial memiliki hubungan yang signifikan ditandai dengan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$. Nilai koefisien regresi kemandirian fiskal daerah berada pada angka 1.043195 yang artinya setiap meningkatnya belanja modal sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.04% pada 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.

4. Indeks Pembangunan Manusia secara parsial memiliki hubungan yang signifikan ditandai dengan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$. Nilai koefisien regresi IPM berada pada angka 2.928474 yang artinya setiap meningkatnya IPM sebesar 1% maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 2.92% pada 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.
5. Dummy Pandemi Covid-19 secara parsial memiliki hubungan yang signifikan ditandai dengan nilai probabilitas sebesar $0.0000 < 0.05$. Nilai koefisien regresi DPC berada pada angka -4.165076 yang artinya setiap meningkatnya kasus Covid-19 sebesar 1% maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4.16% pada 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung tahun 2018-2022.
6. Secara bersama-sama kemandirian fiskal daerah, upah minimum kabupaten/kota, belanja modal, dan indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
7. Nilai R-squared sebesar 0.854394, yang artinya sebesar 85.43% variabel kemandirian fiskal daerah, upah minimum kabupaten/kota, belanja modal, dan indeks pembangunan manusia, mampu menjelaskan variasi nilai-nilai pertumbuhan ekonomi, sisanya sebesar 14.57% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini seperti salah satunya yaitu teknologi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Terbentuknya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diharapkan mampu mempercepat dan mempermudah layanan kepada masyarakat serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia melalui indikator IPM (pendidikan, kesehatan, dan daya beli/pendapatan). Angka Partisipasi Sekolah jenjang SD dan SMP sudah cukup tinggi, namun pada jenjang SMA/SMK harus terus ditingkatkan

terutama di wilayah pedesaan. Rata-rata lama sekolah masih berada di bawah target nasional, pada tahun 2020, rata-rata lama sekolah di Lampung sekitar 8-9 tahun, yang artinya rata-rata penduduk Lampung hanya menempuh pendidikan hingga jenjang SMP. Hal ini harus terus diperbaiki dengan target rata-rata lama sekolah hingga pada jenjang SMA. Tingkat melek huruf di Lampung tergolong tinggi, terutama di daerah perkotaan. Namun, masih ada kesenjangan dengan wilayah pedesaan yang sedikit tertinggal dalam hal literasi. Maka dari itu, pemerintah harus mampu meningkatkan angka serta pemerataan pendidikan hingga tingkat pedesaan.

2. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kesehatan masyarakat hingga pedesaan/kabupaten terdalam seperti peningkatan akses layanan kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, serta penguatan kesejahteraan gizi. Pada sisi daya beli, kesehatan ekonomi masyarakat harus semakin baik yang mana akan berhubungan dengan agregat demand yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendapatan per kapita pada 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung harus meningkat tanpa menyebabkan adanya angka ketimpangan pendapatan. Selain itu, dengan tercukupinya masyarakat dalam mengelola keuangan maka angka kriminalitas juga akan semakin berkurang pada 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan belanja modalnya berupa peningkatan fasilitas publik serta memperbaiki sarana dan prasarana yang memadai seperti perbaikan jalan yang dilakukan di Provinsi Lampung. Arus transportasi perdagangan dan jasa dari Provinsi Lampung ke wilayah lain akan semakin baik dan maningkat yang mana akan mendukung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Lampung. Meningkatnya investasi juga akan memberikan dampak positif pada pembangunan sehingga produktivitas meningkat serta akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
4. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali berbagai sumber-sumber penerimaan fiskal daerah salah satunya peningkatan PAD. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaiknya setiap daerah harus mampu membiayai sendiri berbagai

kegiatan di dalamnya dengan dana yang diperoleh dari PAD. Ketergantungan pendanaan terhadap pemerintah pusat harus di minimalisir sehingga daerah mampu meningkatkan kemandirian keuangannya, ketika daerah sudah mampu meningkatkan kemandirian fiskalnya maka dapat mempercepat pembangunan 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.

5. Pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan pemberian upah yang seimbang dengan kinerja dari angkatan kerja serta dapat memanfaatkan belanja yang digunakan dengan produktif seperti peningkatan program layanan publik, peningkatan aktivitas pembangunan, serta menstimulasi perekonomian. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa kenaikan upah menurunkan pertumbuhan ekonomi. Perlu dilakukannya peningkatan kinerja/produktivitas pekerja mengikuti perkembangan kenaikan upah pada 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung.
6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan periode penelitian, metode penelitian, serta memperbarui/menguji variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung guna menyempurnakan tulisan yang sudah ada sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, F. Y., & Ciptawaty, U. (2020). Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Lampung Tahun Anggaran 2014-2018. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 609. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p02>
- Alif, R., & Hazmi, A. (2024). *Pengaruh kemiskinan dan korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia*. 4(1), 1–10.
- Angeles-Castro, G., Juárez-Cruz, J., & Flores-Ortega, M. (2014). The Effect of Average Wages on the Economy: The Case of the United States. *International Journal of Business and Social Science*, 5(11), 30–39. www.ijbssnet.com
- Arifin, S. R., & Fadllan. (2021). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2018. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 8(1), 38–59. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v8i1.4555>
- Badan Pemeriksa Keuangan (2020), Jumlah Pemerintah Daerah
- Badan Pemeriksa Keuangan (2024), Kemandirian Fiskal Daerah
- Badan Pusat Statistik (2024), Indeks Pembangunan Manusia
- Badan Pusat Statistik (2021), Pertumbuhan Ekonomi
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (2018), Pertumbuhan Ekonomi
- Bayu Windayana, I. B. A., & Darsana, I. B. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Umk, Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi, Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 1, 57. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i01.p04>
- Dewi, N. L. S., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 3(3), 106–114.
- Dinas Kominfotik Provinsi Lampung (2024), Sejarah Provinsi Lampung

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2024), Kemandirian Fiskal Daerah

Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Vol5(2), 1–14. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/1409>

Emalia, Z., & Farida, I. (2018). Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Interaksi Spasial di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 19(1), 61-74.

Gosal, J. S., Lopian, A. L. C. P., & Masloman, I. (2022). Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado Tahun 2005-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 85–96. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/42453>

Haksanggulawan, A., Hajar, I., & Putera, A. (2023). Neraca Neraca. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari*, 1(2), 401–407.

Hasibuan, T., Soleh, A., & Rahman, A. (2023). The Effect Of Capital Expenditure And Local Revenue On Economic Growth In Cities And Regencies In Bengkulu. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Bisnis Digital*, 2(1), 35–40. <https://doi.org/10.37676/jambd.v2i1.3593>

Holzacker. (2015). *Decentralization and Governance for Sustainable Society in Indonesia*

Idris, Z. I., Mu'jizat, P., & Husain, A. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ecogen*, 7(1), 100.

Irasriadipura, I., Rahayu, S., & Junaidi, J. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Pertumbuhanekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Jambi Tahun 2016-. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 82–92. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.16267>

Isnaini, A., Nur Sarviah, S., & Dwi Ratnasari, E. (2023). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Jumlah Tenaga Kerja, Rasio Ketergantungan Dan Rasio Jenis Kelamin Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tengah Tahun 2015-2021. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(3), 601–614. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i3.432>

Keputusan Menteri Dalam Negeri. (2022). Klasifikasi Kemandirian Fiskal dan Pola Hubungan antar Pemerintah Daerah

- Malau, E. I., & Sumaizar, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Pematang Siantar. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 16(1), 9–13.
- Mankiw. (2016). *Principles of Economics 9th Edition*.
- Maramis, M. T. B. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia, 24(2), 224–237.
- Maryanti, S., Handra, H., & Yonnedi, E. (2023). Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 9–18.
- Marselina & Reniza. (2020). *Does Government Intervention Matters on Economic Growth (Case Study ASEAN Countries)*. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(2), 2028- 2032.
- Maury, G. A., Kumenaung, A. G., & Naukoko, A. T. (2023). Pengaruh Belanja Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Berkala Efisiensi*, 23(4), 109–120.
- Murniati, M.-. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Upah Terhadap Tingkat Pengangguran Melalui Jumlah Investasi di Provinsi Jambi. *Jurnal Maneksi*, 7(2), 86–93. <https://doi.org/10.31959/jm.v7i2.197>
- Musgrave, Richard A. (1959). *The Theory of Public Finance: A Study in Public Economy*. McGraw-Hill.
- Nurhayati, Sri Yani Kusumastuti, Nur Hidayatullah, & Suparyati, A. (2023). Determinasi Tingkat Kemandirian Fiskal 62 Kabupaten Tertinggal Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 30(2), 104–112.
- Nurtiyas, F. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Upah Minimum Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2014. *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(2), 166–175.
- Pangestuti, D. C. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen. *Jurnal Mitra Manajemen*, 3(11), 1055–1072.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2023, Tentang Alokasi Dana Pendidikan, Kesehatan, dan Modal Dari APBD
- Peraturan Menteri Keuangan No. 91 Tahun 2007, Tentang Belanja Modal
- Peraturan Menteri Keuangan No. 193 Tahun 2022, Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2022, Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Prakoso, J. A., Islami, F. S., & Sugiharti, R. R. (2019). Analisis Kemampuan Dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 4(1), 87–100. <https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1344>
- Pratiwi, I. G. A. M. A. M. A. (2023). Peranan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *Ganec Swara*, 17(2), 463. <https://doi.org/10.35327/gara.v17i2.444>
- Putri, N. H. (2022). Pengaruh Upah Minimum, Pendidikan, dan Jumlah Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik Tahun 2015 - 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 10(1), 1–10. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/8143>
- Riyadi, W. (2022). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 298–314. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v3i1.2143>
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sampurna, A. F. (2018). *Menuju Manual Review Desentralisasi Fiskal*. Makalah Disajikan dalam Rapat Kerja Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (AKN V dan AKN VI) BPK di Banyuwangi Tanggal 18 September 2018.
- Soukotta, J. E., Pattiruhu, J. R., Siaila, S., Management, P., & Program, S. (2023). *Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Regional Tax Revenue on Regional Financial Independence in Ambon City*. 12(02), 1627–1638.
- Sriyana, Jaka. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sugiarto. (2016). Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan 4(1), 1–23.
- Sugiyanto, H. S., & Musfirati, A. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36.
- Suliswanto, M. (2012). Pengaruh produk domestik bruto dan indeks pembangunan manusia. *Ub Malang*, 3, 3.

- Sundjoto, Sri Rahayu, Rifda Fitrianty, D. H. (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah *Sundjoto*,. 6, 1–23.
- Sutama, I. N., Asmini, & Astika, S. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penetapan Upah Minimum Kabupaten Sumbawa Tahun 2013-2017. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(3), 281–291.
- Todaro & Smith. (2016). *Buku Pembangunan Ekonomi*. Penerbit: Erlangga.
- Undang-undang No. 1 Tahun 2022, Tentang Kemandirian Fiskal Daerah
- Undang-undang No. 6 Tahun 2023, Tentang Upah Minimum
- Undang-undang No. 9 Tahun 2015, Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014, Tentang Otonomi Daerah
- Undang-undang No. 32 Tahun 2014, Tentang Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- UNDP (*United Nations Development Programme*). (2010). Indeks Pembangunan Manusia
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya* (5th Edition). UPP STIM YKPN.
- Wijaksono, R. A., & Syafitri, W. (2023). Analisis Modal Manusia dan Upah Minimum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(4), 814–826.
- Worldometer*. (2022). Peningkatan Kasus Covid-19 di Indonesia Tahun 2020-2022
- Zukhri, N. (2020). Kinerja Keuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ditinjau dari Derajat Kemandirian, Ketergantungan, dan Desentralisasi Fiskal. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(2), 143–149.